



LAPORAN AKSI PERUBAHAN

16

TRANSFORMASI MENUJU DESA DIGITAL PADA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Disusun Oleh:

NAMA : KASMAWATI, S.Pd.

NIP : 1976212012003122007

INSTANSI : Dinas KOMINFOSANDI



LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

**AKSI PERUBAHAN :
TRANSFORMASI MENUJU DESA DIGITAL**



Disusun Oleh :

NAMA : KASMAWATI, S,Pd
NIP : 197612012003122007
INSTANSI : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
JABATAN : KABID INFORMATIKA

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN XVII
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) MAKASAR
TAHUN 2025**



LEMBAR PERSETUJUAN EVALUASI RANCANGAN RENCANA AKSI PERUBAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XVII
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2025

NAMA : KASMAWATI, S.Pd
NIP : 197612012003122007
INSTANSI : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
JABATAN : KABID INFORMATIKA

Rencana Aktualisasi Aksi Perubahan :

TRANSFORMASI MENUJU DESA DIGITAL

Disetujui untuk disampaikan dalam seminar rancangan aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XVII Pusat Pembelajaran Dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2025.

Makasar, 15 Juli 2025

Menyetujui,

COACH

Muhammad Yunus, S.IP., S.Psi., M.Si

MENTOR

Dr. Ishaq Yunus, S.IP., M.AP



LEMBAR PERBAIKAN EVALUASI RANCANGAN RENCANA AKSI PERUBAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XVII
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2025

NAMA : KASMAWATI, S,Pd
NIP : 197612012003122007
INSTANSI : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
JABATAN : KABID INFORMATIKA

Rencana Aktualisasi Aksi Perubahan :

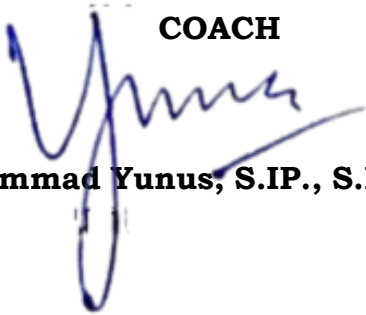
TRANSFORMASI MENUJU DESA DIGITAL

Disetujui untuk disampaikan dalam seminar rancangan aksi perubahan
Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XVII Pusat Pembelajaran Dan
Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan
Lembaga Administrasi Negara Tahun 2025.

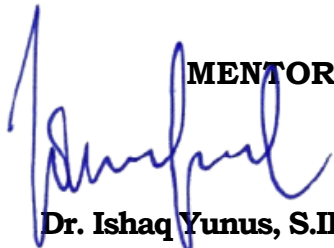
Makasar, 15 Juli 2025

Menyetujui,

COACH


Muhammad Yunus, S.IP., S.Psi., M.Si

MENTOR


Dr. Ishaq Yunus, S.IP., M.AP

PENGUJI,

Sugiarto, S.E., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

NAMA : KASMAWATI, S.Pd
NIP : 197612012003122007
INSTANSI : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN
JABATAN : KABID INFORMATIKA

Menyatakan bahwa naskah Rancangan Aktualisasi Aksi Perubahan :
TRANSFORMASI MENUJU DESA DIGITAL

Merupakan Karya Sendiri dan bukan merupakan pengambilan karya atau tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan, bahwa sebagian atau keseluruhan isi naskah Rancangan Aktualisasi ini merupakan hasil karya atau tulisan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sadar dan penuh rasa tanggungjawab.

Makasar, 15 Juli 2025

Reformer

KASMAWATI, S.Pd



LEMBAR PERSETUJUAN EVALUASI IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XVII
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2025

NAMA : KASMAWATI, S,Pd
NIP : 197612012003122007
INSTANSI : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN
JABATAN : KABID INFORMATIKA

IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN : TRANSFORMASI MENUJU DESA DIGITAL

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Aksi Perubahan Pelatihan
Kepemimpinan Administrator Angkatan XVII Tahun 2025.

Makassar, 15 Juli 2025

COACH

Muhammad Yunus, S.IP., S.Psi., M.S

MENTOR

Dr. Ishaq Yunus, S.IP., M.AP



LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XVII
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2025

NAMA : KASMAWATI, S,Pd
NIP : 197612012003122007
INSTANSI : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
JABATAN : KABID INFORMATIKA

IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN : TRANSFORMASI MENUJU DESA DIGITAL

Telah diseminarkan dan disempurnakan berdasarkan masukan dari Penguji, Coach dan Mentor pada hari selasa 15 Juli 25.

Makassar, 15 Juli 2025

COACH

Muhammad Yunus, S.IP., S.Psi., M.S

MENTOR

Dr. Ishaq Yunus, S.IP., M.AP

KEPALA PUSJAR SKMP LAN MAKASAR

Dr. Muhammad Aswad, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen aksi perubahan dengan judul “Transformasi Menuju Desa Digital” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sebagai salah satu bentuk komitmen dan syarat kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XVII PUSJAR SKMP LAN Makassar Tahun 2025.

Dokumen ini disusun sebagai upaya strategis untuk menjawab tantangan keterbatasan akses informasi dan layanan publik di desa-desa Kabupaten Mamuju Tengah melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam penyusunan Rancangan Aksi Perubahan ini tentu telah memperoleh banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik saran, ide, maupun tenaga yang berguna bagi pelaksanaan rancangan aktualisasi ini ke arah lebih baik. Maka dari itu, melalui ini disampaikan ucapan terima kasih atas segala arahan, bimbingan, dan kontribusi kepada:

1. Bapak Dr. Arsal Aras, S.E, M.Si selaku Bupati Mamuju Tengah
2. Bapak Dr. Ishaq Yunus, S.IP., M.AP selaku Kepala Dinas Kominfoandi Mamuju Tengah sekaligus mentor;
3. Bapak Muhammad Yunus, S.IP., S.Psi., M.Si selaku coach PKA Angkatan XVII Pusjar SKMP LAN Tahun 2025;
4. Seluruh rekan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
5. Seluruh Aparat Pemerintah Desa Waeputeh;
6. Bapak/ibu penyelenggara pelatihan dari PKA Angkatan XVII PUSJAR SKMP LAN Makassar Tahun 2025;

Semoga dokumen aksi perubahan ini dapat memberikan kontribusi positif dan nyata dalam upaya transformasi digital di wilayah pedesaan Kabupaten Mamuju Tengah dan menjadi inspirasi bagi pengembangan inovasi pelayanan publik ke depan. Terima kasih.

Mamuju Tengah, 15 Juli 2025

KASMAWATI, S.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PERSETUJUAN EVALUASI RANCANGAN RENCANA AKSI PERUBAHAN	
LEMBARAN PERBAIKAN EVALUASI RANCANGAN RENCANA AKSI PERUBAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	
LEMBARAN PERSETUJUAN EVALUASI IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN	
LEMBARAN PENGESAHAN EVALUASI IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
II. RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	1
2.1 Pendahuluan	1
2.2 Latar Belakang	1
2.3 Kerangka Berpikir	7
2.4 Tujuan	9
2.5 Manfaat Aksi Perubahan”Transformasi Menuju Desa Digital”	10
2.6 Ruang Lingkup Permasalahan	10
2.7 Analisis Masalah	12
2.8 Analisis Masalah Kinerja Organisasi	14
2.9 Analisis Akar Permasalahan	15
2.10 Strategi SWOT Analisis	18
2.11 Strategi Penyelesaian Masalah	20
2.12 Milestone Dan Tahap Kegiatan	21
2.13 Sumber Daya	26
2.14 Pemetaan Stakeholder	32
2.15 Manajemen Resiko	34
2.16 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan	36
2.17 Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan Dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri	37
III. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	40
3.1 Membangun Integritas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	40
IV. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	46
4.1 Capaian Dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi	48
V. KEBERKLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	62
VI. KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN AKSI PERUBAHAN LEMBARAN PERBAIKAN EVALUASI RANCANGAN RENCANA AKSI PERUBAHAN	65

VII.	DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	66
VIII.	PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	71
IX.	PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Analisis Indikator kinerja utama Diskominfoandi Mamuju Tengah	14
Tabel 2	: Milestone Jangka Pendek	21
Tabel 3	Time line Kegiatan Milestone Jangka Pendek	24
Tabel 4	Milestone Jangka Menengah	25
Tabel 5	: Milestone Jangka Panjang	25
Tabel 6	: Sumber Daya	26
Tabel 7	: Peran Stakeholder	27
Tabel 8	Kebutuhan Sumber daya	31
Tabel 9	: Manajemen Resiko Transformasi Menuju Desa Digital	34
Tabel 10	: Pengembangan Kompetensi	36
Tabel 11	: Rekap Nilai Akhir Perilaku	38
Tabel 12	: Kertas Kerja Pengembangan Potensi Diri	39
Tabel 13	Tabel Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Grafik Progres SPBE Kab Mamuju Tengah	13
Gambar 2	: Diagram Pemetaan Stakeholder	34
Gambar 3	: Koordinasi Dan Konsultasi dengan Kepala Dinas Kominfosandi Selaku Mentor	48
Gambar 4	: Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Kerja	49
Gambar 5	: Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja	50
Gambar 6	: Koordinasi Ke kecamatan Desa	50
Gambar 7	: Dukungan Kepala Desa	51
Gambar 8	: Dukungan Badan Pemberdayaan Desa (PMD)	51
Gambar 9	: Dukungan Bupati Mamuju Terngah	52
Gambar 10	: Dukungan Sekretaris Daerah Mamuju Terngah	52
Gambar 11	: Dukungan Kepala BPKAD Mamuju Terngah	52
Gambar 12	: Dukungan PT. Telkom Cabang Mamuju Tengah	52
Gambar 13	: Dukungan Mitra Aksi Perubahan	53
Gambar 14	: Proses Penyusunan Roadmap Program Kerja Desa Digital Waeputeh	53
Gambar 15	: Proses pembangunan Wifi Area Oublik Dilapangan Desa Waeputeh Dan Perangkat Seperti laptop	54
Gambar 16	: Proses Pelatihan Staf Desa Waeputeh Pengelolaan Layanan Website DEsa	55
Gambar 17	: Proses dan Implementasi Layanan berbasis online Bagi Masyarakat Desa Waeputeh	55
Gambar 18	: Lounching Transformasi Menuju Desa Digital	58
Gambar 19	: Surat Rekomendasi Penetapan Desa Waeputeh Sebagai Desa Digital Dan SK Bupati Mamuju Tengah	57
Gambar 20	: Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Tentang Penetapan Desa Waeputeh Sebagai Desa Digital	62
Gambar 21	: Surat Keputusan Tentang Program Kerja Desa Digital desa Waeputeh	63
Gambar 22	: Diseminasi Ke aparat dan Warga Desa	66
Gambar 23	: Diseminasi Ke stakeholder	66
Gambar 24	: kordinasi bersama coach dan mentor	71
Gambar 25	: Pelatihan pengelolaan website desa	72
Gambar 26	: rapat terkait pembahasan program kerja desas	73
Gambar 27	: Dokumentasi rapat koordinasi lintas sektor	73

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Aksi perubahan “Transformasi Menuju Desa Digital” merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk menjawab tantangan kesenjangan digital di wilayah pedesaan Kabupaten Mamuju Tengah. Inovasi ini berfokus pada digitalisasi pelayanan administrasi desa guna meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi tata kelola, dan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Didorong oleh visi Mamuju Tengah sebagai daerah agropolitan yang maju dan berkelanjutan, program ini menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital aparat dan masyarakat desa, serta pengembangan ekosistem digital desa yang inklusif. Transformasi ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pilot project di Desa Waeputeh, dengan orientasi replikasi ke seluruh desa di wilayah kabupaten.

Melalui penyediaan layanan administrasi berbasis digital, pembangunan website desa, pelatihan literasi digital, serta kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, komunitas, dan akademisi), aksi perubahan ini diharapkan menjadi katalisator perubahan menuju pemerintahan desa yang modern, adaptif, dan partisipatif.

Dengan fondasi regulasi nasional, dukungan stakeholder, dan semangat kolaboratif, “Transformasi Menuju Desa Digital” tidak hanya memperkuat efektivitas layanan publik, tetapi juga menjadi wujud nyata dari pembangunan berbasis teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

II. RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

2.1 Pendahuluan

Transformasi Menuju Desa Digital dengan lokus Desa Waeputehh merupakan upaya terobosan untuk mengubah sistem pelayanan dan administrasi pemerintahan Desa Waeputeh, dari cara-cara manual menjadi lebih efisien yang berbasis digital, hal ini dapat menciptakan pelayanan publik dan tata kelola administrasi desa yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Melalui program ini, Desa Waeputeh diarahkan untuk menjadi "Desa Digital", yaitu desa yang memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan data, hingga pemberdayaan masyarakat secara digital.

Hal ini juga selaras dengan program pemerintah dalam mendorong percepatan transformasi digital di tingkat desa sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital. Dengan terwujudnya Desa Waeputeh sebagai Desa Digital, diharapkan terjadi lompatan besar dalam hal pelayanan publik, efisiensi administrasi, dan keterbukaan informasi, yang pada akhirnya akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat desa Waeputehh secara menyeluruh.

2.2 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. Perkembangan ini menjadi pondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan pelayanan publik. Diera digital saat ini, konektivitas internet yang merata bukan lagi sekadar kebutuhan sekunder, melainkan telah menjadi elemen esensial dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Ujung tombak pembangunan daerah adalah desa, Namun, banyak desa di Kabupaten Mamuju Tengah masih menghadapi keterbatasan dalam hal pelayanan publik, akses informasi, dan pemanfaatan teknologi. Ditengah pesatnya transformasi digital nasional, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam akses dan pemanfaatan teknologi, terutama di daerah-

daerah terpencil dan tertinggal seperti yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Dimana desa secara tidak langsung dituntut untuk lebih adaptif terhadap teknologi agar mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup, akan tetapi, masih menghadapi tantangan serius dalam hal ketersediaan infrastruktur digital dan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat.

Dinas Persandian, Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah hadir sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, dalam hal pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, Staistik Dan Persandian, yang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Staistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada bidang nformatika. Dimana salah satu tugas pokoknya adalah penyebarluasan akses internet sampai keseluruhan wilayah Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan visi Bupati Mamuju tengah “Mamuju Tengah Daerah Agropolitan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” pada Misi Ke 3 “Memperkuat Transformasi Tata Kelola” pada sasaran ke 3 yaitu “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik”.

Akses terhadap jaringan internet merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam pembangunan masyarakat di era digital saat ini. Internet berperan penting dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan publik. Namun, di Kabupaten Mamuju Tengah, infrastruktur dan akses jaringan internet masih tergolong terbatas, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Kondisi ini menghambat pemerataan informasi dan pelayanan digital yang optimal kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pemerataan akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pemerintah pusat maupun daerah menetapkan sejumlah peraturan, yang menjadi acuan dalam pembangunan infrastruktur jaringan internet dan percepatan transformasi digital. Adapun dasar hukum yang terkait dengan program inovasi Transformasi Desa Menuju Desa Digital Di Kabupaten Mamuju Tengah, Sebagai Komponen

Normatif Atau Kondisi Ideal Yang Diharapkan Antara Lain:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, Menjamin hak masyarakat atas informasi, serta mendorong penyediaan layanan digital yang aman dan merata.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamankan desa sebagai ujung tombak pembangunan, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi informasi.
3. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Mengamankan seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk menerapkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan efisien, yang sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet.
4. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital Nasional.
5. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Program BAKTI Kominfo: Sebagai bagian dari program Universal Service Obligation (USO), bertujuan untuk menyediakan akses internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk wilayah-wilayah seperti Mamuju Tengah.

Secara normatif target kinerja dan standar pelayanan yang diharapkan yaitu:

1. Terwujudnya desa-desa di Kabupaten Mamuju Tengah menjadi desa digital.
2. Meningkatkan pelayanan administrasi desa berbasis teknologi informasi
3. Mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui platform digital.
4. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

6. Peningkatan Literasi Digital kepada masyarakat untuk mendukung program desa digital.
7. Penguatan Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah dimana seluruh layanan publik berbasis digital diharapkan dapat terintegrasi dalam sistem informasi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan SPBE.

Meskipun secara normatif pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi dan target kinerja untuk mendukung pembangunan infrastruktur jaringan internet, namun kondisi aktual sebagian besar desa di Kabupaten Mamuju Tengah masih belum terkoneksi secara memadai dengan jaringan internet, sehingga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan desa masih sangat terbatas. Selain itu, perangkat desa belum memiliki kapasitas digital yang cukup, baik dari sisi penguasaan perangkat lunak maupun manajemen informasi berbasis teknologi.

Dibawah ini beberapa permasalahan dan kondisi nyata yang ada di desa-desa di Kabupaten Mamuju Tengah saat ini antara lain:

1. Administrasi masih dilakukan secara manual, memakan waktu, dan banyak kesalahan administrasi.
2. Pelayanan publik, masyarakat datang ke kantor desa dengan antrian yang cukup Panjang sehingga membutuhkan waktu dan tidak efisien.
3. Informasi publik tersedia atau hanya terbatas pada papan pengumuman saja yang terdapat dikantor desa, sehingga akses informasi tidak bisa diakses di mana saja hanya berada dikantor desa.
4. Transparansi dan akuntabilitas terkait penggunaan dana desa tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
5. Partisipasi masyarakat yang rendah, masyarakat hanya hadir jika ada pertemuan atau musyawarah desa.
6. Sebagian besar desa di Kabupaten Mamuju Tengah masih belum terkoneksi secara memadai dengan jaringan internet, terutama di daerah dengan medan geografis yang sulit seperti pegunungan atau area hutan seperti .Desa Senjango, Desa Kambunong, Desa Panggaloang, Desa Salubiro, Desa karossa, Desa lembah Hopo, Desa sukamaju, Desa sejati, Desa tasokko, Desa batu Parigi, Desa Kire dan

Desa salulekbo sehingga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan desa masih sangat terbatas dan perangkat desa belum memiliki kapasitas digital yang cukup, baik dari sisi penguasaan perangkat lunak maupun manajemen informasi berbasis teknologi. Selain itu, Jumlah menara BTS (Base Transceiver Station) sejumlah 45, yang di bangun oleh pihak swasta dalam hal ini provider telkomsel sebanyak 32 titik dan indosat sebanyak 13 BTS, masih terbatas dan belum tersebar optimal, sehingga sinyal lemah atau bahkan tidak tersedia di sejumlah wilayah. (Sumber: Kemenkominfo RI Ditjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika, Loka Monitor Spektrum Frekwensi Radio Mamuju, Januari 2024).

7. Keterbatasan anggaran, Meskipun program “transformasi menuju Desa Digital” sangat strategis, namun implementasinya memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit dimana masalah anggaran seperti: Keterbatasan alokasi APBD dan Dana Desa dan Keterbatasan biaya operasional pasca implementasi.
8. Kendala Regulasi, Pemerintah daerah belum memiliki Peraturan Daerah atau Perbup terkait regulasi khusus tentang digitalisasi desa di tingkat daerah.
9. Dukungan dari pemerintah daerah, Belum adanya Komitmen pemerintah daerah dan kepala desa terkait desa digital.

Dalam menjawab tantangan terkait hasil analisis diatas tersebut, maka lahirlah program inovasi **“Transformasi Menuju Desa Digital”** di Kabupaten Mamuju Tengah yaitu inovasi yang dibuat dalam membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan transformasi desa konvensional menjadi desa digital, sejalan dengan program pemerintah terkait percepatan transformasi digital, serta memberikan layanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas kepada masyarakat,

Mengapa Proyek Perubahan inovasi Transformasi Menuju Desa Digital di Kabupaten Mamuju Tengah, Penting untuk dilaksanakan karna :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat Desa pelayanan manual kerap memakan waktu, rawan kesalahan, dan menyulitkan

masyarakat di daerah terpencil. Digitalisasi memungkinkan akses layanan yang lebih cepat, tepat, dan terdokumentasi.

2. Menjawab kebutuhan zaman dan arah kebijakan nasional pemerintah pusat, mendorong adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi desa melalui Permendesa No. 8 Tahun 2022. Proyek perubahan ini menjadi langkah implementatif di tingkat lokal.
3. Mengurangi kesenjangan digital antara kota dan desa, masyarakat desa berhak mendapatkan akses informasi dan pelayanan setara dengan masyarakat kota. Proyek perubahan ini menjembatani kesenjangan tersebut secara konkret.
4. Mendorong kemandirian dan partisipasi warga desa melalui forum digital, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi, mengakses informasi keuangan desa, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa secara aktif.
5. Membuka peluang ekonomi digital bagi umkm lokal, marketplace digital desa memungkinkan produk-produk lokal dikenal lebih luas dan dijual tanpa batasan wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara langsung.
6. Efisiensi anggaran dan transparansi keuangan desa layanan digital mengurangi beban biaya cetak, distribusi dokumen fisik, serta meningkatkan pengawasan publik terhadap penggunaan dana desa.
7. Mendukung agenda prioritas nasional (asta cita)

Beberapa terobosan inovatif yang diperlukan dalam Transformasi Menuju Desa Digital Sebagai solusi dari permasalahan adalah:

1. Pembangunan dan Pengembangan Platform Digital Desa, dimana setiap desa akan difasilitasi untuk memiliki website resmi dan sistem informasi pelayanan desa yang terintegrasi (misalnya untuk layanan surat menyurat, informasi keuangan, pengumuman, data kependudukan, dan sebagainya).
2. Pelatihan Literasi Digital bagi Aparat dan Warga Desa, Program peningkatan kapasitas SDM desa melalui pelatihan digital dasar hingga menengah bagi aparat desa, serta edukasi masyarakat agar mampu menggunakan layanan digital desa secara mandiri.

3. Digitalisasi Administrasi dan Layanan Publik, Proses layanan administrasi desa seperti pembuatan surat keterangan, izin usaha, dan dokumen lainnya dilakukan secara digital melalui aplikasi atau website desa.
4. Integrasi Sistem dengan Pemerintah Daerah Menghubungkan sistem informasi desa dengan sistem informasi kabupaten (contoh: SIPD, Siskeudes) untuk meningkatkan sinergi dan efisiensi pelaporan serta perencanaan pembangunan.
5. Pemanfaatan Media Sosial dan Aplikasi Chat untuk Layanan Responsif Desa, didorong memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan instan (seperti WhatsApp) untuk menjawab pertanyaan masyarakat, menyampaikan informasi, dan melakukan komunikasi pelayanan yang cepat.
6. Dukungan Infrastruktur TIK Berkoordinasi dengan dinas terkait dan pihak swasta (penyedia jaringan internet) untuk memperluas dan menstabilkan akses internet di desa.

2.3 Kerangka Berfikir

Dalam aksi perubahan ini, gambaran secara menyeluruh dan terstruktur tentang alur logis yang menghubungkan antara permasalahan yang terjadi di desa-desa Kabupaten Mamuju Tengah, terutama dalam hal keterbatasan akses layanan publik dan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, dimana beberapa faktor penyebab mendasar seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, minimnya regulasi pendukung, serta keterbatasan kapasitas aparatur desa.

Dengan memahami akar persoalan secara mendalam, dapat dijabarkan arah solusi strategis melalui pendekatan inovatif berupa '**Transformasi Menuju Desa Digital**' yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur teknologi dan sistem informasi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kolaborasi multipihak, serta pengembangan ekosistem digital desa yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan harapan terciptanya pemahaman yang komprehensif terhadap proses transformasi digital di tingkat desa, sehingga implementasi

aksi perubahan dapat dilakukan secara efektif, terukur, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat di era digital saat ini.

A. Permasalahan Utama yang dihadapi adalah:

- a. Pelayanan publik desa masih bersifat manual, lambat, dan kurang transparan.
- b. Akses internet belum merata, terutama di desa-desa terpencil.
- c. Rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat desa.
- d. Keterbatasan infrastruktur TIK dan sistem administrasi digital.
- e. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa.

B. Penyebab Permasalahan

- a. Belum tersedianya kebijakan dan regulasi di daerah khusus terkait digitalisasi desa.
- b. Keterbatasan kapasitas SDM dalam penggunaan teknologi informasi.
- c. Rendahnya anggaran untuk pengembangan infrastruktur digital.
- d. Kurangnya integrasi data dan koordinasi antar perangkat daerah.
- e. Ketimpangan akses teknologi akibat faktor geografis.

C. Dampak dari permasalahan

- a. Keterlambatan dalam pelayanan publik dan pencatatan administrasi.
- b. Ketidakterjangkauan informasi desa oleh masyarakat luas.
- c. Rendahnya transparansi pengelolaan dana dan pembangunan desa.
- d. Kurangnya inovasi lokal dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

D. Solusi/Inovasi yang Ditawarkan

- a. Pengembangan website dan sistem informasi desa berbasis digital.
- b. Pelatihan literasi digital bagi perangkat desa dan masyarakat.
- c. Penyediaan akses internet publik di balai desa dan fasilitas umum.
- d. Integrasi data desa dengan sistem informasi pemerintah daerah.
- e. Kolaborasi multipihak (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat).

E. Tujuan Transformasi Menuju Desa Digital

- a. Mewujudkan pelayanan publik desa yang cepat, transparan, dan akuntabel melalui digitalisasi.
- b. Meningkatkan kapasitas SDM desa dalam pemanfaatan TIK.

- c. Membangun desa yang mandiri dan modern berbasis teknologi.
- d. Mendukung peningkatan nilai indeks SPBE dan indeks pembangunan statistik daerah.

F. Outcome yang Diharapkan

- a. Terwujudnya pilot project Desa Digital di Desa Waeputehh.
- b. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan digital perangkat desa.
- c. Tersedianya platform digital pelayanan publik yang terintegrasi.
- d. Terciptanya ekosistem desa digital yang dapat direplikasi ke desa-desa lainnya di Kabupaten Mamuju Tengah.

2.4 Tujuan

Dalam meningkatkan pelayanan publik desa yang cepat, tepat dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi Inovasi Transformasi Menuju Desa Digital Di Kabupaten Mamuju Tengah, dimana tujuan dari inovasi ini adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan membangun sistem pelayanan digital yang terintegrasi dan mudah diakses, inovasi Transformasi Menuju Desa Digital Di Kabupaten Mamuju Tengah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik, memperluas akses informasi, serta mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pendidikan, dan pelayanan publik yang lebih inklusif. Untuk lebih jelasnya tujuan inovasi ini dipetakan menjadi tiga yaitu:

A. Tujuan Jangka Pendek (dua Bulan),

Terwujudnya pilot project Desa Digital dengan lokus Desa Waeputeh sebagai desa sasaran.

B. Jangka Menengah (enam bulan sampai satu tahun),

Terbangunnya ekosistem digital lokal desa

C. Jangka Panjang (satu sampai dua tahun)

Terwujudnya replikasi model desa digital, yang dapat direplikasi keseluruhan desa di Kabupaten Mamuju Tengah

2.5 Manfaat Aksi Perubahan “Transformasi Menuju Desa Digital”

A. Manfaat Jangka Pendek

- a. Meningkatnya pemahaman aparat desa terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- b. Tersedianya infrastruktur dasar digital (seperti koneksi internet, perangkat komputer).
- c. Pelayanan administrasi desa mulai beralih ke sistem digital (e-office).
- d. Tersusunnya data kependudukan dan pelayanan secara digital di tingkat desa.

B. Manfaat Jangka menengah

- a. Terbentuknya ekosistem digital desa yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.
- b. Pelayanan publik desa menjadi lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi.
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui platform digital.
- d. Dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal melalui promosi dan pemasaran digital (UMKM Desa Go Digital).

C. Manfaat Jangka Panjang

- a. Terwujudnya desa yang mandiri dan modern berbasis digital.
- b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui akses informasi dan pelayanan digital.
- c. Terbangunnya sistem pemerintahan desa yang terbuka, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
- d. Memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi digital daerah dan nasional.

2.6 Ruang Lingkup Permasalahan

Inovasi **Transformasi Menuju Desa Digital** di Kabupaten Mamuju Tengah, sejalan dengan **ASTA CITA ke empat** yaitu memperkuat Sumber daya manusia, sains, teknologi Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan gender, peningkatan peran perempuan, Pemuda dan penyandang disabilitas.

Permasalahan yang dihadapi pada tingkat desa mencakup rendahnya literasi digital aparat desa, terbatasnya infrastruktur teknologi informasi, serta sistem administrasi yang masih bersifat manual. Hal ini menyebabkan pelayanan publik di desa kurang efisien, lambat, dan sulit dijangkau oleh

masyarakat luas, terutama oleh kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Melalui transformasi digital, aparat desa diberikan pelatihan dan pendampingan agar mampu memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Ini merupakan bentuk nyata dari penguatan sumber daya manusia sebagaimana tercantum dalam ASTA CITA.

Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana digital turut mendorong pemanfaatan sains dan teknologi di tingkat desa, menciptakan sistem pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Aksi ini juga memberikan perhatian khusus terhadap kesetaraan gender dan inklusi sosial, dengan membuka akses dan pelatihan digital kepada perempuan peningkatan kapasitas pemuda desa dalam hal teknologi juga sejalan dengan semangat ASTA CITA untuk menjadikan pemuda sebagai agen perubahan di era digital.

Dengan demikian, “Transformasi Menuju Desa Digital” tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan administrasi dan pelayanan publik di desa, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi seperti yang diamanatkan dalam ASTA CITA keempat, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Wilayah Implementasi, dimulai pada desa percontohan (pilot project) yang dipilih berdasarkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dan diperluas secara bertahap ke seluruh desa di Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Aspek Teknis dan Operasional, pengembangan sistem informasi desa berbasis website dan aplikasi mobile, digitalisasi layanan administrasi desa (pembuatan surat, laporan keuangan, dll), penyediaan dan penguatan infrastruktur TIK (jaringan internet dan perangkat keras), integrasi data dan sistem informasi desa dengan pemerintah daerah.
3. Pengembangan SDM dan Literasi Digital, Pelatihan teknis bagi aparat desa dalam pengelolaan sistem informasi desa, edukasi digital untuk masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan online, pembentukan tim pengelola teknologi digital tingkat desa.

4. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi layanan digital, pemanfaatan kanal digital untuk promosi potensi ekonomi lokal dan usaha desa, dukungan bagi UMKM desa agar bisa mengakses pasar digital.
5. Keterlibatan Multi-Pihak (Stakeholder), Sinergi antara pemerintah kabupaten,kecamatan, desa, BUMDes, sekolah, penyedia layanan internet, akademisi, dan kolaborasi dalam penyediaan pelatihan, teknis, dan anggaran pelaksanaan.

2.7 Analisis Masalah

a. Profil Kinerja Organisasi

Dinas komunikasi, Informatika statistik dan persandian, mempunyai tugas pokok melaksanakan empat urusan pemerintahan daerah yaitu urusan komunikasi, urusan Informatika, urusan Statistik Dan urusan Persandian. Selain itu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosandi) Kabupaten Mamuju Tengah merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, modern, dan berbasis teknologi.

Dinas ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan keamanan informasi, serta statistik, baik sebagai urusan wajib pelayanan dasar maupun non-pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah. Ada tiga indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik Dan Persandian yaitu:

1. Indeks SPBE
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
3. Indeks Pembangunan Statistik Daerah

Fungsi utama Diskominfo Mamuju Tengah meliputi:

1. Pengembangan infrastruktur TIK di seluruh wilayah kabupaten, termasuk desa-desa terpencil.
2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah.
3. Penyebaran informasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

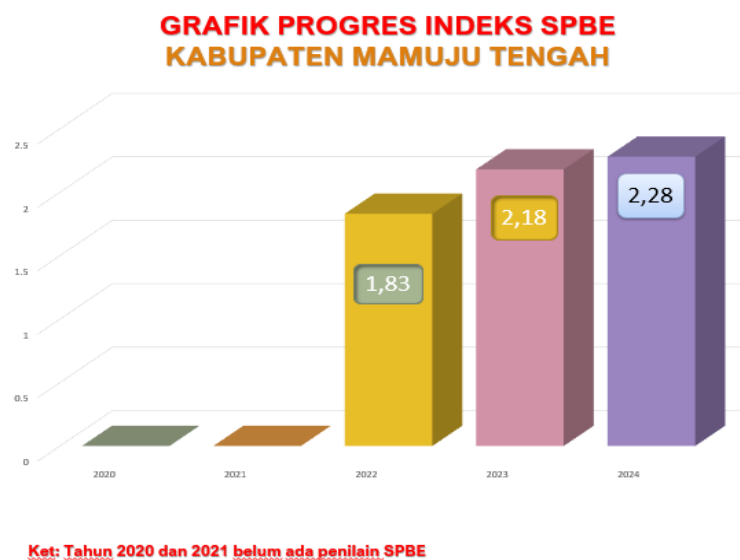
4. Pengelolaan data dan statistik sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan.
5. Penguatan literasi digital bagi aparaturnya dan masyarakat.

Kondisi kinerja Diskominfoandi menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital di wilayah pedesaan. Langkah-langkah yang telah diambil, seperti peningkatan infrastruktur digital, penguatan literasi digital, dan kolaborasi lintas sektor, sejalan dengan tujuan aksi perubahan untuk mewujudkan desa digital. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan desa-desa di Kabupaten Mamuju Tengah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi pemerintahan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Indeks kinerja Diskominfoandi Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, antara lain:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan peningkatan dari 2,19 pada tahun 2023 menjadi 2,28 pada tahun 2024.
2. Indeks pembangunan statistik turut juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 1,05 pada tahun 2023 menjadi 2,52 pada tahun 2024.

Dengan peran tersebut, Diskominfo menjadi garda terdepan dalam mewujudkan transformasi digital daerah, termasuk pelaksanaan inovasi “Desa Digital” sebagai upaya percepatan pemerataan layanan berbasis teknologi hingga ke tingkat desa, Ini dapat terlihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 1. Grafik Progres Indeks SPBE Kab Mamuju Tengah

2.8 Analisa Masalah Kinerja Organisasi

Berdasarkan data dan kondisi terkini, dapat kita lihat peningkatan indeks SPBE dari tahun 2022, sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan, begitupula dengan indeks pembangunan statistic yan terus naik dengan signifikan namun hal ini tidak menjadikan kinerja organisasi Dinas Komunikasi Informatika statistik dan persandian dikategorikan baik, karna peningkatan yang terjadi tidak mampu memenuhi target yang diharapkan. Peningkatan tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan utama yang menghambat kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendukung inovasi “Transformasi Menuju Desa Digital”, hal ini dapat terlihat pada table berikut:

Tabel 1. Analisis Indikator kinerja utama Diskominfo sandi Mamuju tengah

No	Indikator Kinerja	Kondisi 2023	Kondisi 2024	Analisa Masalah
1	Indeks SPBE	2,19 (Predikat “Cukup”)	2,28 (Predikat “Cukup”)	▪ Kenaikan tipis menunjukkan komitmen, namun masih di bawah standar “Baik” (2.60). ▪ Fokus selama ini lebih pada pengadaan infrastruktur, kurang pada aspek human centered design (HCD) layanan.
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Belum ada penilaian resmi	Belum ada penilaian resmi	▪ Tidak ada sistem pemantauan terbuka, laporan dan data belum dipublikasikan secara berkala. ▪ Kurangnya pemanfaatan portal keterbukaan yang terintegrasi.

3	Indeks Pembangunan Statistik Daerah	1,05 (Predikat “Kurang”)	2,52 (Predikat “Cukup”)	▪ Peningkatan signifikan menandakan perbaikan pengumpulan dan pengelolaan data. ▪ Namun, kapasitas perangkat Daerah untuk input dan analisis data masih rendah.
---	--	-----------------------------	----------------------------	--

2.9 Analisi Akar Permasalahan:

1. Infrastruktur TIK yang Belum Merata, Banyak desa terpencil belum terjangkau jaringan internet stabil atau sama sekali belum terkoneksi. Jumlah menara BTS (45 titik) belum merata, terutama di area pegunungan dan hutan.
2. Literasi Digital yang Rendah, Aparatur desa dan masyarakat umum masih kesulitan menggunakan aplikasi dan portal e-government, belum ada program pelatihan berkelanjutan.
3. Sistem Pemantauan dan Evaluasi yang Lemah, Belum terbangunnya mekanisme pelaporan capaian SPBE dan keterbukaan informasi secara real-time, Tidak ada indikator spesifik pada masing-masing desa untuk memacu peningkatan kinerja.
4. Keterbatasan Regulasi dan Kebijakan Lokal, Belum ada Perbup atau aturan desa khusus yang mengatur digitalisasi layanan desa, sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten tertunda, sehingga implementasi SPBE belum optimal.
5. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya, Alokasi APBD dan Dana Desa untuk program TIK masih terbatas, biaya operasional pasca-implementasi (pemeliharaan, upgrade) jarang dianggarkan.

Dampak Permasalahan terhadap “Transformasi Menuju Desa Digital” yaitu:

1. Pelayanan Publik Terhambat Warga desa masih mengalami antre panjang dan proses manual yang memakan waktu, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah desa menurun.

2. Transparansi Terbatas Data anggaran dan proses pengambilan keputusan tidak dapat diakses masyarakat secara online, meningkatkan risiko kecurangan dan ketidakpuasan publik.
3. Pertumbuhan Ekonomi Desa Lambat UMKM lokal tidak mendapatkan platform digital yang efektif untuk menjangkau pasar luas, sehingga potensi ekonomi desa belum tergarap maksimal.
4. Partisipasi Publik Rendah Kurangnya kanal digital interaktif membuat aspirasi masyarakat sulit tersalurkan, sehingga keterlibatan warga dalam musyawarah desa menjadi minimal.

Dalam upaya memberika solusi kondisi masalah kinerja organisasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah jika ditinjau dari perpektif program kerja “TRANSFORMASI MENUJU DESA DIGITAL”, maka dapat dianalisis sebagai pendekatan ilmiah dengan menggunakan SWOT Analysis sebagai berikut:

1. Strengths (Kekuatan):

- a. Infrastruktur dasar yang tersedia seperti BTS dan akses internat baik yang disediakan oleh Dinas Kominfosandi, atau yang berasal dari bantuan pusat seperti Kementrian Kominfodigi melalui dirjen Bakti dan Postel sehingga beberapa desa dan telah memiliki akses jaringan internet dan perangkat tik dasar yang akan memberikan akses kemudahan dalam pembangunan layanan berbasis digital yang sejalan dengan program “Transformasi Menuju Desa Digital”
- b. Tersedianya sumber daya manusia internal yaitu dengan adanya pegawai atau tenaga ahli di Dinas yang memahami teknologi informasi dan komunikasi sehingga memudahkan dalam memberika bantuan terkait penyelesaian kegiatan yang berkaitan dengan digitalisasi.
- c. Selain itu komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Komitmen bupati dan kepala Dinas untuk mendorong inovasi rencana aksi “Transformasi Menuju Desa Digital” terwujud dengan layanan publik yang berbasis digital.

2. Weaknesses (elemahan):

- a. Masih banyak wilayah dan mukim desa dengan sinyal lemah atau blank spot belum terjangkau jaringan internet yang stabil sehingga

program inovasi aksi perubahan “Transformasi Menuju Desa Digital” dapat terhambat.

- b. Kurangnya Literasi Digital Masyarakat dan Perangkat Desa, banyak aparat desa belum terbiasa menggunakan aplikasi digital dalam pelayanan administrasi sehingga implementasi program “Transformasi Menuju Desa Digital” butuh ekstra kegiatan peningkatan SDM masyarakat maupun aparat desa.
- c. Keterbatasan anggaran dinas Kominfosandi menyebabkan pengadaan perangkat, pelatihan, dan pengembangan sistem tidak dapat terlaksana dengan maksimal.
- d. Kurangnya Data Terintegrasi, pada sistem database desa yang saling terkoneksi, sehingga menyulitkan sinkronisasi data desa.

3. Opportunities (Peluang)

- a. Dengan adanya dukungan regulasi melalui kebijakan nasional dan daerah yang mendukung digitalisasi desa, seperti program Desa Cerdas dari Kementerian Desa dan transformasi digital dari Kementerian Kominfo dapat membantu pelaksanaan program “Transformasi Menuju Desa Digital”.
- b. Dukungan Program Nasional dan Hibah Digitalisasi, tersedia banyak program nasional dan peluang dana dari pemerintah pusat, CSR BUMN, maupun mitra swasta.
- c. Kemajuan Teknologi Cloud dan Open Source, tersedianya platform murah atau gratis untuk digitalisasi layanan desa.
- d. Kemitraan dengan Pihak Swasta atau Perguruan Tinggi, potensi kolaborasi untuk membangun sistem informasi desa, pelatihan SDM, dan asistensi teknis.
- e. Tuntutan masyarakat akan pelayanan cepat dan transparan meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan digital yang mudah diakses.

4. Threats (Ancaman)

- a. Resistensi perubahan, adanya aparat desa atau masyarakat yang masih enggan beralih ke sistem digital karena kenyamanan sistem manual.

- b. Keamanan siber, ancaman kebocoran data dan serangan siber yang dapat merusak sistem layanan digital desa.
- c. Ketimpangan akses teknologi, perbedaan yang mencolok antara desa maju dan desa tertinggal dalam kesiapan digital.
- d. Perubahan kebijakan atau prioritas pemerintah daerah, ketidakstabilan arah kebijakan yang bisa mempengaruhi keberlanjutan program Transformasi Menuju Desa Digital

2.10 Strategi Swot Analysis

1. Strategi SO (Strengths-Opportunities)

Strategi ini diarahkan untuk memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki Dinas Kominfo guna meraih peluang eksternal yang tersedia. Dengan struktur organisasi yang sudah tertata, dukungan regulasi nasional tentang keterbukaan informasi publik dan transformasi digital, serta adanya SDM yang mulai adaptif terhadap teknologi, Kominfo dapat meningkatkan perannya sebagai penggerak utama digitalisasi di daerah. Peluang seperti program nasional “Satu Data Indonesia”, perluasan jaringan internet oleh BAKTI Kominfo, serta tren peningkatan partisipasi masyarakat dalam kanal digital harus dimanfaatkan secara optimal. Kominfo dapat menjadi koordinator penguatan sistem layanan digital antar-organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus mendorong percepatan digitalisasi desa melalui pelatihan, fasilitasi platform digital, dan integrasi data yang lebih baik.

2. Strategi WO (Weaknesses - Opportunities)

Strategi ini bertujuan mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan berbagai peluang eksternal. Salah satu tantangan yang dihadapi Kominfo adalah keterbatasan anggaran, infrastruktur TIK yang belum merata, serta masih rendahnya literasi digital. Untuk mengatasinya, Kominfo dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, maupun lembaga swasta yang bergerak di bidang teknologi informasi.. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi berbasis cloud dapat menjadi solusi atas keterbatasan perangkat keras lokal, terutama dalam hal server dan penyimpanan data. Strategi ini juga membuka ruang bagi

Kominfo untuk memperluas jangkauan layanannya tanpa membebani APBD secara berlebihan.

3. Strategi ST (Strengths – Threats)

Dalam menghadapi ancaman eksternal seperti cepatnya perkembangan teknologi, potensi serangan siber, serta kesenjangan digital antar wilayah, Kominfo dapat mengandalkan kekuatan internal yang sudah ada. Salah satunya adalah penguatan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap sistem informasi daerah. Kominfo dapat menyusun roadmap digitalisasi yang inklusif dan adaptif, memastikan bahwa setiap kemajuan teknologi direspon dengan kebijakan teknis dan sumber daya yang memadai. Strategi lainnya adalah membentuk tim teknis keamanan informasi (Computer Security Incident Response Team - CSIRT) tingkat daerah untuk menghadapi risiko keamanan data dan kebocoran informasi. Peran aktif dalam mendorong standar keamanan digital lintas OPD menjadi bagian penting dari transformasi ini, sekaligus menjawab tantangan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

4. Strategi WT (Weaknesses – Threats)

Strategi ini bersifat protektif dan bertujuan meminimalisir kelemahan sambil menghindari dampak dari potensi ancaman. Dalam hal ini, Kominfo perlu menyusun kebijakan internal yang komprehensif terkait tata kelola sistem informasi, keamanan data, dan pengelolaan layanan digital. Pembenahan dilakukan melalui perencanaan penguatan kapasitas SDM secara bertahap, mulai dari pelatihan dasar hingga peningkatan kompetensi manajerial teknologi informasi. Selain itu, audit teknologi secara berkala dan evaluasi sistem informasi daerah perlu dilakukan agar Kominfo tetap responsif terhadap ancaman dari luar, termasuk serangan digital dan kebocoran data. Kolaborasi antarlembaga juga diperkuat agar Kominfo tidak bekerja sendiri, melainkan menjadi simpul koordinasi lintas sektor dalam membangun pemerintahan berbasis digital yang efektif dan aman.

Untuk strategi pengembangan program “Transformasi Menuju Desa Digital” perlu diarahkan untuk:

1. Memaksimalkan potensi internal yang dimiliki dinas;

2. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor guna menjawab keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis;
3. Melakukan penguatan literasi digital secara menyeluruh;
4. Menyusun roadmap implementasi desa digital secara bertahap dan berkelanjutan.

Pendekatan yang terstruktur dan responsif terhadap kondisi lokal, program “Transformasi Menuju Desa Digital” ini diharapkan dapat mempercepat proses digitalisasi desa dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mamuju Tengah.

2.11 Strategi Penyelesaian Masalah

1. Terobosan Inovatif

“Transformasi Menuju Desa Digital” merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan keterbatasan akses informasi, layanan publik yang lambat, dan rendahnya literasi digital masyarakat desa. Terobosan inovasi yang diusulkan mencakup pendekatan berbasis teknologi, partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas aparatur desa, yaitu:

- a. Pembangunan dan Optimalisasi Website Desa, dikembangkan sebagai pusat informasi dan layanan digital, fitur-fitur utama meliputi Profil desa, informasi kependudukan, agenda kegiatan desa, serta laporan realisasi dana desa yang transparan dan akuntabel.
- b. Pelatihan Literasi Digital untuk Perangkat dan Masyarakat Desa
Pelatihan diberikan kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai penggunaan teknologi digital, keamanan data, serta pemanfaatan platform digital untuk pendidikan, bisnis, dan pelayanan publik.
- c. Menyediakan Fasilitas Pusat Informasi dan Layanan Internet Gratis (Desa WiFi publik), dimana akses internet gratis disediakan di balai desa sehingga masyarakat bisa mengakses informasi, mengikuti pelatihan daring, atau mengembangkan usaha berbasis digital.
- d. Layanan Administrasi Berbasis Aplikasi Mobile Inovasi dalam bentuk aplikasi layanan desa mempermudah warga untuk mengakses layanan administrasi, seperti permohonan KTP, KK, surat keterangan usaha, dan lainnya secara daring, tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

- e. Kolaborasi dengan Stakeholder Teknologi Menggandeng pihak swasta, Provider, perguruan tinggi, komunitas IT untuk mendampingi desa dalam proses digitalisasi, termasuk pengembangan aplikasi sederhana dan sistem manajemen data yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

2.12 Milestone dan Tahap Kegiatan

Untuk memastikan implementasi “Transformasi Menuju Desa Digital” berjalan secara sistematis dan terukur, maka perlu rancangan milestone (tahapan capaian) beserta kegiatan utama yang mendukung pencapaian tujuan dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah rincian milestone kegiatan yaitu:

Tabel 2: Milestone Jangka Pendek

No	Milestone	Kegiatan	Waktu	Output
1	Terbentuknya Tim Efektif aksi Perubahan Transformasi Menuju Desa Digital (dengan SK resmi)	- Melakukan konsultasi dengan Mentor - Rapat pembentukan tim kerja - Menyusun SK Tim dan uraian tugas - Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal - Koordinasi Ke Kecamatan - koordinasi program ke aparat desa Waeputeh - Koordinasi dengan mitra pendukung Stakholder Eksternal	Minggu II Senin, 12 Mei 2025 Minggu II Rabu, 14 Mei 2025 Minggu II Kamis, 15 Mei 2025 Minggu III Kamis, 22 Mei 2025 Minggu III Kamis, 22 Mei 2025 Minggu III Kamis, 22 Mei 2025 Minggu IV Senin, 26 Mei 2025	- Surat pernyataan dukungan mentor - Undangan, daftar hadir dan notulen rapat. - SK tim kerja dan uraian tugas - Foto/Video - Dokumen jumlah mitra Pendukung yang mendukung aksi perubahan
2	Tersusunnya roadmap Program Kerja	- Survei kesiapan digital (akses	Minggu III Jumat, 23 Mei 2025	- Foto-foto survei - Dokumen SK Program Kerja

	Desa desa digital	internet, perangkat, SDM) - koordinasi dengan Staf Pemerintah Desa Waeputehh, - Rapat Penyusunan roadmap Program Kerja Desa desa digital desa digital	Minggu ke III Selasa 17 Juni 2025 Minggu ke III Jumat 20 Juni 2025	Desa desa digital desa digital
3	Tersedianya Infrastruktur dasar	- Koordinasi dengan mitra pendukung Eksternal - Pengadaan internet desa (Wi-Fi public) - Pembuatan website desa (informasi dasar & berita desa)	Minggu III Kamis 22 Mei 2025 Minggu II Selasa 10 Juni 2025 Minggu III sd IV 20 Mei sd 28 Juni 2025	- Pembangunan Internet Gratis di Area Publik Desa Waerputeh - Internet aktif di Area Ruang Publik (lapangan, Pustu) - Website desa aktif dan dapat diakses publik
4	Tersedianya Pelatihan literasi digital dasar untuk perangkat desa dan masyarakat	Koordinasi dengan pemerintah desa Waeputeh Kordinasi dengan narasumber pelaksanaan pelatihan literasi bagi aparat desa Sosialisasi Penerapan sistem administrasi desa berbasis digital ke warga Desa Waeputeh	Minggu I Selasa 1 Juli 2025 Minggu IV Senin 30 Juni 2025 Minggu I Kamis 3 Juli 2025 Minggu I Jumat 4 Juli 2025	- Surat menyurat - Daftar Hadir - Dokumentasi - Perangkat desa mampu mengoperasikan komputer dan mengelola dokumen digital - Masyarakat memahami cara penggunaan dan pemanfaatan layanan digital Desa Waeputeh

5.	Terlaksananya Launching layanan publik digital desa	- Melaksanakan rapat Kordinasi persiapan Launching layanan publik digital - Launching layanan publik digital desa	Minggu II Jumat, 11 juli 2025	Terlaksananya launching layanan publik digital dan uji coba layanan
6	Tersedianya Sk Bupati Mamuju Tengah tentang penetapan desa Waeputeh sebagai Desa digital kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025	- Kordinasi ke bagian hukum - Menyusun Sk Rekomendasi Penetapan Desa Waeputeh Sebagai Desa Digital - Menyusun draf rancangan sk Bupati - terbitnya SK Bupati dengan bagian hukum	Minggu IV Jumat 20 Juni 2025 Minggu IV Selasa 24 sd Kamis 26 Juni 2025 Minggu I Selasa 24 Juni 2025 Minggu II Jumat, 11 juli 2025	- SK Rekomendasi Kadis Kominfosandi terkait penetapan desa waeputeh Sebagai Desa Digital - SK Bupati Mamuju Tengah terkait penetapan desa Waeputeh sebagai desa digital di kab. Mamuju tengah

Tabel 3. Time Line Kegiatan Milestone Jangka Pendek

No	Tahap Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan													
			Mei (Minggu)					Juni (Minggu)				Juli (Minggu)				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Terbentuknya Tim Efektif Transformasi Menuju DesaDigital (dengan SK resmi)	- Melakukan konsultasi dengan Mentor														
		- Rapat pembentukan tim kerja														
		- Menyusun SK Tim dan uraian tugas														
		- Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal														
		- Koordinasi Ke Kecamatan														
		- koordinasi program ke aparat desa Waeputeh														

	ke desa lain yang ada di kab mateng	- Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka replikasi desa digital terkait Penetapan desa digital		
	Tersedianya regulasi desa digital	- Kordinasi dengan Bupati mamuju tengah - Kordinasi dengan OPD terkait , bagian hukum - Kordinasi ke bagian hukum utnuk pembuatan Perbup desa digital	(2025 sd 2026)	- Perbup mamuju tengah - Surat edaran

2.13 Sumber Daya

Transformasi menuju desa digital menuntut pengelolaan sumber daya yang efektif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pengelolaan ini mencakup seluruh proses perencanaan, pemanfaatan, serta evaluasi terhadap sumber daya manusia, sarana prasarana, informasi, dan teknologi guna memperkuat konektivitas, pelayanan publik, dan pendidikan digital di wilayah pedesaan.

Dalam rangka mendukung kelancaran implementasi aksi perubahan perlu untuk menentukan dan memafaatkan sumber daya organisasi yang ada. Sumber daya sebagai berikut:

Tabel 6. Sumber Daya

Tim Kerja	Nama	Peran
Project Leader	Kasmawati	- Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan aksi proyek perubahan. - memimpin tim work
Anggota Tim Efektif:		
Kabid Komunikasi	rusli	Membantu dalam publikasi dan fasilitasi dengan media massa untuk branding aksi perubahan menuju desa digital

Kabid Persandian	Nunung	Membantu dalam koordinasi dan implementasi terkait keamanan data
Kasi statistic	atriani	Membantu dalam menyiapkan rapat-rapat
Kasubag Kepegawaian/bendahara	nurul	Menyiapkan sarana prasarana, administrasi, untuk aksi perubahan
Tim Teknis IT	- Irfan Busra - Erdiansyah - Komang Aditya,S.KOM - Lalu Tarmuzi	Menyiapkan pengembangan aplikasi dan kebutuhan jaringan
Staf Kontrak	- Ketut gaweni, - Dewi Cornelius, - Muh. Kiral Anwar,	Membantu dalam pelaksanaan kegiatan seperti pelaksanaan rapat, membuat undangan dan penyebaran undangan
	- Andriani Mutmainnah, S.Kom	Membantu dalam dokumentasi kegiatan dan evident kegiatan
Tim Evaluasi dan Monitoring	Perwakilan dari Inspektorat dan Dinas Kominfo	Memantau efektivitas program dan mengusulkan perbaikan berkelanjutan.

Tabel 7. Peran Stakholder Dan Strategi Komunikasi

STAKHOLDER INTERNAL	PERAN	STRATEGI KOMUNIKASI
Kepala Dinas	- Mentor Reformer - Memberikan persetujuan atas gagasan Reformer - Memantau setiap perkembangan tahapan kegiatan - Membantu menyelesaikan masalah/kendala yang muncul - Memberikan dukungan untuk	- Melaporkan secara rutin rencana aksi dengan menampilkan data-data pendukung sehingga meyakinkan pimpinan untuk menyetujui gagasan aksi perubahan - sebagai solusi pemecahan - Meminta arahan

	pemanfaatan seluruh potensi dan Sumber Daya yang diperlukan dalam melaksanakan Aksi Perubahan - Memastikan keberlanjutan program, digital.	pelaksanaan kegiatan - Menerima segala kritikan dan saran yang diberikan oleh pimpinan
Pemerintah Desa (Kepala Desa)	- Pemimpin perubahan di tingkat desa. - Menyusun program kerja transformasi desa waeputeh menjadi desa digital - Menginisiasi dan menyetujui kebijakan digitalisasi. - Mengalokasikan anggaran desa untuk pengembangan digital.	- Kordinasi yang intens terkait pelaksanaan implementasi desa waeputeh ke desa digital - Melibatkan dalam setiap kegiatan peluncuran program - Memberika data manfaat yang konkret
Perangkat Desa (Sekdes, staf, operator)	- Mengoperasikan sistem administrasi berbasis digital (misalnya: sistem surat menyurat, pendataan penduduk, layanan publik). - Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara digital. - Menerima pelatihan dan terlibat aktif dalam implementasi TIK di desa.	- Komunikasi dua arah - Libatkan dalam perencanaan program kerja digital. - Pelatihan intensif TIK - Simulasi sistem layanan digital
Masyarakat Desa	- Sebagai Pengguna Layanan Digital Desa - Sebagai Kontributor Data dan Informasi - Sebagai Agen Perubahan	- Sosialisasi langsung - Gunakan Bahasa Lokal dan testimoni sesama warga
Pemuda/Karang Taruna	- Pengguna layanan digital - Menjadi pelopor literasi dan edukasi digital. - Mendukung operasional sistem digital desa. - Membuat dan mengelola	- Workshop konten digital (IG/YouTube desa) - Libatkan dalam branding dan kampanye sosial

	konten promosi desa. - Mendorong inovasi dan solusi digital lokal. - Menjadi jembatan kolaborasi desa dengan pihak luar.	media - Kompetisi konten digital lokal
BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	- Memberikan masukan dan pengawasan. - Menyuarakan aspirasi warga. - Mendorong keterlibatan masyarakat. - Agen perubahan, inovator lokal, pendukung adopsi teknologi.	- FGD dengan warga dan kepala desa - Edukasi fungsi digitalisasi dalam pengawasan
STAKHOLDER EKSTERNAL	PERAN	STRATEGI KOMUNIKASI
Bupati Mamuju Tengah	- Sebagai kepala daerah penentu kebijakan dalam memberikan dukungan politik dan kebijakan untuk Desa Digital di Desa Waeputeh. - Mendorong integrasi program ini dalam prioritas pembangunan daerah.	- Melakukan koordinasi dan meyakinkan pelaksanaan aksi perubahan ini dengan proposal yang menghasilkan sebuah Desa Digital sesuai dengan misi ketiga dan mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta percepatan transformasi Digital
Sekda	- Mengkoordinasikan antar-OPD agar mendukung kebutuhan transformasi digital di Waeputeh, seperti akses	- Penyampaian program berbasis data yang kongkrit

	internet, pelatihan, dan sistem informasi.	
Bapperida Litban	- Menyusun perencanaan strategis jangka menengah dan panjang untuk digitalisasi desa seperti Waeputeh. - Memasukkan program ke RKPD kabupaten.	- Penyampaian program berbasis data yang kongkrit
BPKPAD	Mengelola pembiayaan dan pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur digital - pelatihan SDM desa di Waeputeh.	- Penyampaian dalam program berbasis data yang kongkrit dalam penyediaan anggaran pendampingan
Dinas PMD	- Mendorong Pemerintah Desa Waeputeh agar mengarahkan Dana Desa untuk program TIK. - Menyediakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparat desa.	- Mengkomunikasikan keberlanjutan atau replikasi bagi desa lain
Kementerian Desa, Kominfodigi	- Menyalurkan program nasional seperti <i>Desa Cerdas</i>, <i>BLT Digital</i>, ke Desa Waeputeh. - Menyediakan platform digital gratis bagi layanan publik desa.	- Koordinasi lewat chat WA, terkait Pengajuan Proposal program strategis nasional - Sinergi dengan program desa cerdas
KOMINFO Provinsi	- Pendamping teknis, fasilitator pelatihan, penghubung ke pusat.	- Koordinasi dan melakukan pendekatan MoU bantuan infrastruktur dan pelatihan - Dokumentasi capaian sebagai model provinsi
Bagian Hukum	- Penyusunan SK Bupati	- Koordinasi terkait Pendampingan penyusunan

		regulasi digital
LSM/Organisasi Sosial	- Edukasi masyarakat, advokasi hak digital dan inklusivitas.	- Kordinasi dan meminta Pendampingan lapangan, pelatihan inklusi digital - Kemitraan pemberdayaan komunitas
Akademisi/Universitas	- Menurunkan mahasiswa KKN Tematik Desa Digital ke Desa Waeputeh. - Membuat riset dan rekomendasi berbasis data tentang kebutuhan teknologi lokal masyarakat.	- Kordinasi terkait penempatan mahasiswa KKN tematik desa digital
Perusahaan Swasta, Provider	- Penyedia infrastruktur, solusi perangkat lunak dan layanan digital.	- Kunjungan dan komunikasi dalam pengajuan Proposal CSR dengan dampak sosial yang terukur
Media Lokal	- Penyebar informasi dan edukasi publik, promotor inovasi desa digital.	- Komunikasi terkait Rilis media berkala dan liputan lapangan

Tabel 8. Kebutuhan Sumber daya

Kegiatan	Stakeholder Yang Terlibat	Peran Stakeholder	Sumber Daya Yang Dibutuhkan
1	2	4	(4)
Terbentuknya Tim Transformasi Digital (dengan SK resmi)	Kepala Dinas, sekretaris, seluruh Kepala Bidang, kasi, dan Staf	- Menyiapkan SK Tim - Menyiapkan uraian tugas dan jadwal kerja Tim	- Sarana ruang rapat - ATK - Perangkat elektronik pendukung
Tersedianya Infrastruktur	BAPERIDA LITBAN	Memberikan data dan informasi perencanaan	- Sarana ruang rapat

dasar, di desa, Penyediaan Akses Internet ke sekolah		program desa digital	- ATK - Perangkat elektronik pendukung
	Inspektorat	Melakukan audit dan evaluasi independen terhadap program kegiatan transformasi menuju desa digital	
	Dinas Pendidikan	Kordinasi terkait desa penyebaran digitalisasi transformasi menuju desa digital	
	Provider	Menyiapkan sarana prasarana, akses internet dan pmenjamin ketersediaan internet	- Sarana ruang rapat - ATK - Perangkat elektronik pendukung
- Pelatihan literasi digital dasar untuk perangkat desa dan kader masyarakat	BPPKSDM Makassar	Menyediakan materi pelatihan	- Link zoom - Perangkat elektronik pendukung (laptop)
	KOMINFOSANDI	- Membantu menyediakan Domain Desa - server untuk sistem informasi/aplikasi - Membantu keamanan data sistem informasi - Menyiapkan link zoom	
	Masyarakat	Mengikuti kegiatan sosialisasi atau pelatihan	
Pengembangan aplikasi layanan desa berbasis mobile/web	Tenaga IT kominfo	Mengembangkan aplikasi layanan desa berbasis mobile/web	Perangkat elektronik pendukung (laptop)
Terwujudnya replikasi model desa digital, yang dapat direplikasi ke desa lain yang ada di kab mateng	Dinas PMD	Menyiapkan desa yang akan menjadi desa replikasi	Menyediakan regulasi
	Pemerintah desa	Desa yang akan menjadi lokus replikasi	Infrastruktur tik
	Masyarakat desa	Penerima perubahan, maanfaat digitalisasi	Perangkat elektronik
Tersedianya regulasi desa digital	Bupati	Pemberi kebijakan	Perangkat elektronik
	Bagian hokum	Pembuatan SK, perbup	Perangkat elektronik, referensi regulasi

2.14 Pemetaan Stakholder

a. Promotors (Pengaruh Tinggi, Kepentingan Tinggi)

Promoters merupakan pihak yang memiliki kepentingan besar terhadap keberhasilan aksi perubahan dan memiliki pengaruh yang kuat dalam mendukung keberhasilan dan implementasinya. Dalam konteks ini, yang termasuk promoters yaitu : Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju tengah, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

b. Defenders (Pengaruh Tinggi, Kepentingan Rendah)

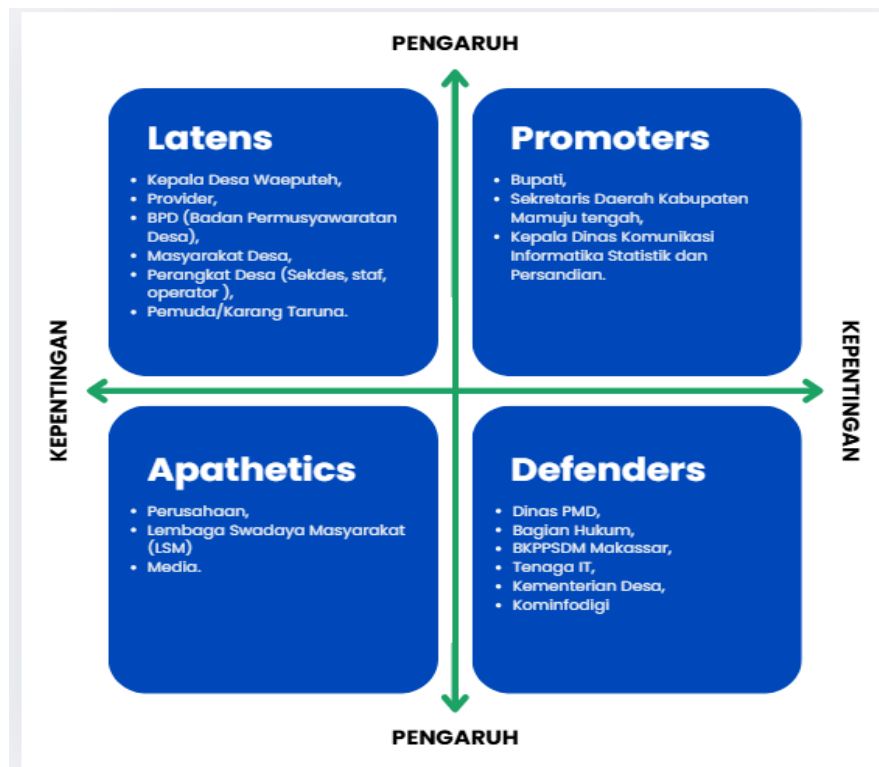
Kelompok ini memiliki pengaruh besar, namun tingkat kepentingannya terhadap aksi perubahan tidak sebesar promoters. Mereka bisa menjadi pendukung strategis jika diberikan informasi dan dilibatkan secara efektif. Yang termasuk defenders adalah Dinas PMD, Bagian Hukum, BKPPSDM Makassar, Tenaga IT, Kementerian Desa, Kominfodigi

c. Latents (Pengaruh Rendah, Kepentingan Tinggi)

Kelompok ini memiliki kepentingan besar terhadap keberhasilan aksi perubahan, namun pengaruh mereka terhadap kebijakan masih terbatas. Mereka perlu diperkuat kapasitasnya agar bisa memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Yang termasuk latents adalah Kepala Desa Waeputeh, Provider, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Masyarakat Desa, Perangkat Desa (Sekdes, staf, operator), Pemuda/Karang Taruna.

d. Apathetics (Pengaruh Rendah, Kepentingan Rendah)

Kelompok ini memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah terhadap aksi perubahan. Namun, mereka tetap perlu diberikan informasi agar memahami manfaat program ini. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media.



Gambar 2. Diagram Pemetaan Stakholder

2.15 Manajemen Resiko

Transformasi menuju desa digital merupakan sebuah langkah penting dalam upaya mempercepat pembangunan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Namun, dalam proses ini, berbagai risiko dapat muncul yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan transformasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis manajemen risiko guna mengidentifikasi potensi masalah yang dapat terjadi, mengevaluasi dampaknya, serta merencanakan strategi mitigasi

Tabel 9. Manajemen Risiko Transformasi Menuju Desa Digital

NO	KEGIATAN	RISIKO	LANGKAH ANTISIPASI
1.	Terbentuknya Tim Efektif Transformasi Menuju DesaDigital (dengan SK resmi)	Sikap pegawai yang apatis	Pendekatan persuasive Untuk memberikan pemahaman dengan baik terkait rencana aksi perubahan
2.	Pembangunan Infrastruktur TIK	Keterbatasan akses internet dan	- Kerja sama dengan penyedia layanan

		perangkat keras di desa	internet untuk peningkatan jaringan - Pembangunan infrastruktur yang merata.
2	Penyediaan Pelatihan Digital	Resistensi terhadap teknologi atau perubahan oleh masyarakat atau aparatur desa	- Melakukan sosialisasi dan edukasi intensif - Melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan.
3	Pengembangan Aplikasi dan Sistem Digital	Ketergantungan yang tinggi pada teknologi (risiko gangguan sistem)	- Menyusun rencana pemeliharaan sistem dan perangkat keras - Pelatihan dasar untuk masalah teknis.
4	Pengelolaan Data Desa Digital	Keamanan data dan privasi yang rentan dibobol atau disalahgunakan	- Menerapkan kebijakan perlindungan data dan enkripsi - Pelatihan kepada aparatur desa tentang keamanan data.
5	Pembiayaan dan Penganggaran Program	Keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang dapat menghambat pelaksanaan	- Mengajukan proposal pendanaan kepada pemerintah pusat. - Pemanfaatan anggaran secara efisien dan prioritas.
6	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Digital	Perubahan kebijakan atau regulasi yang menghambat proses transformasi	Menjaga komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.- Mengembangkan kebijakan yang fleksibel.
7	Pemeliharaan Layanan Internet Desa	Gangguan layanan internet atau kualitas internet yang buruk	Menyediakan cadangan infrastruktur untuk mendukung jaringan.- Bekerja sama dengan ISP untuk pemantauan.
8	Pelatihan Literasi Digital kepada Masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi digital	Menyelenggarakan pelatihan literasi digital secara berkala 2.15.1 Penggunaan

			media komunikasi lokal.
--	--	--	-------------------------

2.16 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Dalam aksi perubahan transformasi menuju desa digital ini, ternyata ada pihak-pihak yang terdampak, untuk itu perlu peningkatan kompetensi terhadap pihak-pihak yang terdampak dalam rangka mendukung pelaksanaan aksi perubahan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 10. Pengembangan Kompetensi

No.	Pihak Terdampak	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi
1	Perangkat Desa (Sekdes, Kasi, staf, Operator pengelola website dan SID)	Kemampuan menggunakan komputer dan internet Penguasaan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID), Tata kelola dan input data digital dan memperbarui website desa Menyajikan data dan informasi publik secara berkala Dasar keamanan digital dan backup data	Pelatihan teknis oleh Dinas Kominfo, dan pembimbingan langsung di desa (on-site)
2	Kepala Desa	Pengambilan keputusan berbasis data/pengawasan keputusan program digital desa	Pelatihan manajemen desa digital, dari Pendampingan fasilitator
3	Pemuda/Karang Taruna, PKK	- Literasi digital umum (komputer, internet) - Pembuatan konten kreatif (video desa, infografis) - Promosi digital produk lokal (UMKM)	Workshop digital kreatif di desa- Pelatihan kerja sama dengan Dinas Kominfo, Kelas daring via, Zoom.)

4	Masyarakat Umum	Pemahaman dasar penggunaan HP/smartphone- Akses dan penggunaan layanan digital desa (e-Surat, pengurusan ktp surat ijin, dll.)- Kesadaran keamanan digital	Sosialisasi langsung di desa- Pelatihan kelompok PKK, posyandu, Penggunaan media dan simulsi langsung
---	-----------------	--	---

2.17 Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan Dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Pemetaan sikap perilaku Kepemimpinan dan rencana strategi pengembangan potensi diri Sebagai bagian dari proses pelaksanaan aksi perubahan “*Transformasi Menuju Desa Digital*”, perlu dilakukan pemetaan terhadap kompetensi diri melalui self-assessment dan penyusunan kertas kerja kepemimpinan. Hasil dari pemetaan ini menjadi dasar dalam menyusun strategi pengembangan potensi diri agar lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai pemimpin perubahan.

Dalam melakukan Identifikasi Pengembangan Diri dilakukan melalui Self Assesment dan Kertas Kerja.

1. Self Assesment

Mengisi Instrument Self Assesment, hasil akhirnya dimasukkan dalam RAP dalam bentuk deskriptif ataupun tabel

2. Kertas Kerja

Hasil Self Assesment menjadi dasar penyusunan Strategi Pengembangan Diri.

a. Rekap Nilai Akhir Perilaku Peserta

Tabel 10. Rekap Nilai Akhir Perilaku Peserta

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: KASMAWATI, S.Pd	Nama Mentor	: Dr. ISHAQ YUNUS, S.IP, M.AP		
NIP	: 19761201 200312 2 007	NIP:	: 19711011993031005		
Jabatan	: Kabid Informatika	Jabatan	: Kepala Dinas,		
Instansi	: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan	Instansi	: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian		
Program	: PKA ANGKATAN 17				
Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	7,00	7,00	7,00	7,00	Baik
Mentor	7,00	7,00	7,00	7,00	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	7,00	7,00	7,00	7,00	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9.00-10	Istimewa		7,00		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup		Kualifikasi:		
3-4.99	Kurang		Baik		
1-2.99	Sangat Kurang				
REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:					
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi				
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas				
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas				
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas				
Sangat Kurang	:				

b. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Tabel 11. Kertas Kerja Pengembangan Potensi Diri

No	Komponen /Sub Komponen	Panduan Intervensi	Kegiatan pengembangan diri untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan	Kegiatan /tahapan aksi perubahan	Waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan diri	
					Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Integritas/ Kedisiplinan	Kemampuan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perilaku disiplin secara kesinambungan dalam pelaksanaan aksi perubahan	Melakukan monitoring evaluasi monitoring dan evaluasi terhadap perilaku disiplin secara kesinambungan dalam pelaksanaan aksi perubahan	Evaluasi awal efektivitas sistem Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan lanjutan - Sosialisasi lanjutan kepada warga	Juni sd juli 2025	
2.	Kerjasama/ Komunikasi	Kemampuan menyampaikan suatu informasi dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh stakeholders untuk mendapat dukungan sesuai tujuan capaian aksi perubahan	menyampaikan informasi dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh stakeholders untuk mendapat dukungan sesuai tujuan capaian aksi perubahan	Melaksanakan rapat koordinasi dengan kepala desa BUMDes, staf, operator	Juni sd juli 2025	
3.	Mengelola Perubahan	Kemampuan mengelola berbagai sumber daya untuk mendapatkan hasil kerja perubahan secara optimal dengan cara yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan aksi perubahan	Mengelola berbagai sumber daya untuk mendapatkan hasil kerja perubahan secara optimal dengan cara yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan aksi perubahan	Tersedianya Infrastruktur dasar , Wifi gratis untuk area publik	Juni sd juli 2025	

III. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

3.1 Membangun Integritas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap aktivitas, kebijakan, dan pelayanan dalam organisasi dijalankan dengan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Integritas merupakan nilai dasar yang mencerminkan kejujuran, konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan moral.

sedangkan akuntabilitas mencerminkan kemampuan dan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik dan atasan. Membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam konteks transformasi menuju Desa Digital, nilai-nilai integritas dan akuntabilitas menjadi semakin penting untuk memastikan proses digitalisasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

A. Integrasi dalam Organisasi

Integritas dalam organisasi adalah konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan yang dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma serta etika. Dalam konteks pemerintahan desa, integritas tercermin dalam cara aparat desa bekerja secara jujur, terbuka, dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. sejalan dengan Transformasi Menuju Desa Digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang berbasis integritas. Beberapa bentuk keterkaitannya yaitu terkait dengan Transparansi Informasi Publik, Teknologi digital memungkinkan publik mengakses informasi desa seperti keuangan, kegiatan pembangunan, layanan administrasi, dan data penduduk. Integritas ditunjukkan ketika informasi yang ditampilkan adalah benar, tidak direayasa, dan sesuai fakta, Pelayanan Digital yang Jujur

dan Adil Layanan berbasis online seperti pembuatan surat keterangan, pengaduan warga, atau pengajuan bantuan harus dilayani secara merata dan tanpa diskriminasi.

Integritas tercermin saat aparat desa melayani semua warga dengan prosedur yang sama, tanpa pilih kasih. Dalam sistem digital, data warga tersimpan dalam basis data elektronik, Integritas sangat penting untuk memastikan bahwa data tidak disalahgunakan, tidak dijual, atau dimanipulasi. Pengelolaan anggaran Digital Sistem seperti Siskeudes Online atau Website Desa memungkinkan publik melihat penggunaan anggaran secara real-time. Pemimpin yang berintegritas tidak hanya membuka akses data, tetapi juga menggunakan anggaran sesuai rencana dan kebutuhan riil masyarakat serta Keteladanan Pemimpin Desa atau Kepala desa dan perangkatnya harus menjadi contoh dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, Integritas akan tampak ketika pemimpin desa tidak menyalahgunakan akses digital untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

B. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja organisasi adalah kewajiban setiap unit atau individu dalam organisasi untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja, penggunaan sumber daya, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dalam sektor pemerintahan, akuntabilitas mencakup pelaporan kinerja secara transparan, penggunaan anggaran yang efisien, serta pelayanan yang bisa diakses dan dinilai oleh masyarakat. Transformasi menuju Desa Digital mendorong peningkatan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Berikut bentuk-bentuk keterkaitannya:

1. Sistem Informasi yang Terbuka dan Terukur, Digitalisasi memungkinkan pelaporan kegiatan dan hasil kerja secara sistematis dan real-time melalui platform seperti Website Desa, Siskeudes, dan aplikasi layanan publik. Akuntabilitas meningkat karena masyarakat dapat memantau kinerja dan anggaran tanpa

harus datang langsung ke kantor desa.

2. Dokumentasi Kegiatan dan Data Elektronik, Setiap aktivitas desa dapat didokumentasikan secara digital, termasuk berita acara musyawarah, laporan kegiatan, dan dokumentasi pembangunan fisik. Hal ini mempermudah audit, pelaporan ke instansi di atasnya, serta menjadi bukti kinerja yang sah.
3. Pengukuran Kinerja Aparatur Secara Objektif, Dengan sistem kerja berbasis aplikasi, indikator kinerja aparat desa dapat diukur lebih objektif, seperti jumlah layanan yang diselesaikan, waktu pelayanan, hingga kepuasan warga. Ini mendorong tanggung jawab individu dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan transparan.
4. Peningkatan Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat Digitalisasi membuka ruang partisipasi publik, seperti fitur pengaduan online, polling aspirasi warga, atau forum diskusi virtual. Akuntabilitas organisasi meningkat karena masyarakat dapat langsung memberi masukan dan mengawasi jalannya pemerintahan.
5. Pelaporan Realisasi Program dan Anggaran, Dengan aplikasi dan sistem online, realisasi penggunaan dana desa dapat dipublikasikan dan dibandingkan dengan rencana kerja. Hal ini membangun kepercayaan publik karena dana digunakan sesuai tujuan dan dilaporkan secara terbuka.

C. Membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Langkah untuk membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi adalah:

- a. Pemimpin harus menjadi role model dalam bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dimana keteladanan akan mendorong budaya kerja yang positif.
- b. Menanamkan nilai-nilai etika dan moral dapat dilakukan Lakukan melalui pelatihan kode etik, nilai integritas, dan perilaku profesional, juga dapat menerapkan reward & punishment yang adil bagi setiap staf.
- c. Keterbukaan dan Transparansi, dapat dibangun dengan sistem

informasi yang terbuka untuk publik, semisal laporan keuangan, capaian kerja, dan proses pengambilan keputusan.

- d. Membudayakan Anti-Korupsi merupakan budaya yang perlu diterapkan sebagai sistem pengendalian internal yang baik.
- e. Menyediakan canal-canal saluran pengaduan (whistleblowing system) guna mengevaluasi kinerja organisasi.

D. Pengelolaan Budaya Kerja

Aspek penting untuk memastikan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada aspek teknis saja, akan tetapi juga pada cara berpikir dan pola kerja aparatur adalah budaya kerja. Setiap organisasi memiliki budaya kerja yang berbeda. Karakter dari sebuah budaya kerja atau iklim kerja menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam lingkungan kerja. Pengelolaan budaya kerja merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku kerja yang mendukung keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam mewujudkan transformasi menuju desa digital, perubahan tidak hanya dilakukan pada aspek teknologi dan sistem kerja, tetapi juga harus menyentuh cara berpikir dan bertindak para aparatur desa. Oleh karena itu, pembangunan budaya kerja yang sesuai menjadi kunci utama agar digitalisasi tidak sekadar menjadi simbol modernitas, melainkan benar-benar menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, dan berintegritas. Budaya kerja yang dibentuk melalui aksi perubahan ini diarahkan untuk mendukung tata kelola desa yang lebih terbuka, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat berbasis teknologi. Budaya kerja yang dibangun dalam aksi perubahan ini adalah:

- a. Berorientasi Pelayanan, Setiap aparatur desa didorong untuk memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif kepada masyarakat melalui media digital. Masyarakat menjadi pusat dari setiap inovasi layanan, baik melalui website desa, aplikasi layanan surat online, maupun komunikasi via media sosial desa.
- b. Disiplin dan Tanggung Jawab, Perubahan sistem kerja dari manual

ke digital menuntut kedisiplinan dalam mengelola data, memperbarui informasi secara berkala, serta konsistensi dalam menjalankan prosedur layanan digital. Menanamkan nilai tanggung jawab terhadap akurasi data dan keberlangsungan sistem informasi yang digunakan kepada Staf desa.

- c. Adaptif terhadap Perubahan Teknologi, membangun budaya kerja yang terbuka terhadap pembaruan teknologi, dengan mendorong aparatur desa untuk terus belajar, mengikuti pelatihan, dan menggunakan sistem digital secara aktif. Sikap adaptif menjadi penting agar transformasi digital tidak terhambat oleh keterbatasan keterampilan.
- d. Kolaboratif dan Terbuka , digitalisasi desa tidak bisa berjalan sendiri, sehingga budaya kerja kolaboratif menjadi penting baik antar perangkat desa, lintas sektor, maupun dengan masyarakat. Semua pihak didorong untuk terbuka dalam berbagi informasi dan bekerjasama dalam mendukung program digitalisasi. Akuntabel dan Transparan Melalui pemanfaatan teknologi digital, setiap proses kerja terdokumentasi dan dapat diakses secara terbuka. Hal ini membentuk budaya kerja yang akuntabel, di mana setiap aktivitas layanan dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh publik.

E. Membangun Jejaring Dan Kolaborasi

Jejaring merupakan proses membangun dan memperluas hubungan kerja dengan berbagai pihak yang memiliki potensi untuk saling mendukung, berbagi informasi, atau bekerja sama di masa depan. Jejaring bersifat non-struktural, tapi sangat strategis dalam menciptakan akses terhadap sumber daya dan peluang. Sedangkan kolaborasi merupakan bentuk kerja sama aktif dan terencana antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan membagi tugas, tanggung jawab, sumber daya, dan hasil.

Dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi antar bagian dari satu organisasi atau dengan organisasi lain, akan memudahkan setiap individu mengatasi masalah untuk tujuan bersama. Membangun

jejaring kerja (kemitraan) pada hakekatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar.

Dalam aksi perubahan transformasi menuju desa digital, membangun jejaring dan kolaborasi menjadi strategi penting untuk memastikan keberhasilan implementasi program. Hal ini karena transformasi digital di desa tidak bisa berjalan sendiri, dibutuhkan kerjasama dan dukungan multipihak baik dari internal pemerintah maupun eksternal. Jejaring dan kolaborasi merupakan proses membangun hubungan.

Dalam aksi perubahan ini, jejaring kerja dan kolaborasi yang terbangun melalui :

- a. Kolaborasi Internal Pemerintah Daerah, yaitu Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo, PMD, Bappeda, dan kecamatan untuk sinkronisasi program, dukungan kebijakan, dan pembiayaan kegiatan digitalisasi.
- b. Dengan Aparatur Desa, melibatkan langsung pemerintah desa sebagai pelaksana utama aksi perubahan, termasuk dalam pelatihan, pengelolaan website, dan pelayanan digital.
- c. Kemitraan Eksternal, yaitu dengan Operator Telekomunikasi dan ISP seperti PT. Telkom dan Indosat, Untuk perluasan jaringan internet di wilayah area publik, selain itu Lembaga Pelatihan dan Universitas dapat Menjalin kerja sama pelatihan peningkatan kapasitas TIK aparatur desa juga dengan Komunitas Digital & Relawan TIK guna pendampingan teknis seperti literasi digital masyarakat, dan pengembangan aplikasi sederhana berbasis kebutuhan lokal.
- d. Kolaborasi Partisipatif dengan Masyarakat, Mengajak tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok perempuan seperti ibu-ibu PKK untuk berpartisipasi aktif dalam penggunaan dan penyebaran

informasi melalui media digital desa. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi secara online melalui website atau media sosial resmi desa.

Dengan membangun jejaring dan kolaborasi yang kuat, maka program desa digital menjadi lebih komprehensif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa memiliki akses ke dukungan teknis, sumber daya, dan inovasi baru. Masyarakat menjadi mitra aktif, bukan hanya penerima layanan, dalam proses transformasi digital desa.

F. Strategi Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi merupakan langkah penting dalam mendukung keberhasilan aksi perubahan *Transformasi Menuju Desa Digital*. Tanpa sumber daya manusia yang memahami dan mampu mengoperasikan teknologi digital, maka program yang dirancang tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, strategi pengembangan kompetensi yang dilakukan adalah strategi komunikasi organisasi yang difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan aparat desa serta tim pelaksana agar mampu menjalankan layanan digital secara efektif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini diperlukan tim yang dinamis dalam menyelesaikan pekerjaan. Tim yang dinamis adalah tim yang memiliki kinerja yang sangat tinggi, yang dapat memanfaatkan segala energi yang ada dalam tim tersebut untuk menghasilkan sesuatu.

Dalam Pengembangan kompetensi strategi komunikasi organisasi beberapa hal yang perlu dilakukan oleh reformer, antara lain:

- a. Melakukan Identifikasi Kebutuhan Kompetensi, Reformer harus terlebih dahulu memetakan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh aparat desa dalam mendukung program desa digital, langkah ini dapat dilakukan melalui, wawancara singkat atau diskusi dengan perangkat desa, selain itu observasi lapangan terhadap penggunaan teknologi yang ada Mengkaji tugas-tugas digitalisasi desa yang belum dikuasai.
- b. Reformer kemudian Menyusun Materi dan Jenis Pelatihan yang Tepat, seperti Pelatihan pengelolaan website desa, Pelatihan literasi digital dasar, Pelatihan dokumentasi dan pelaporan online.

- c. Langkah selanjutnya adalah menggandeng narasumber atau Lembaga Pendukung, Reformer juga bekerja sama dengan pihak terkait agar pelatihan berjalan efektif, seperti, dinas Kominfo provinsi, Tenaga IT profesional atau internal pemerintah, dan Lembaga pelatihan digital universitas.
- d. Menyelenggarakan Pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek), dimana reformer mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan dengan cara: Menentukan waktu dan tempat pelatihan, Mengundang peserta yang tepat (perangkat desa, admin, operator), Menyediakan fasilitas pelatihan sederhana (laptop, proyektor, jaringan)
- e. Melakukan Pendampingan Pasca Pelatihan, Reformer melakukan kunjungan langsung ke desa atau mendampingi peserta saat mulai mengaplikasikan materi.
- f. Melakukan Evaluasi dan Perbaikan, Reformer mengevaluasi hasil pengembangan kompetensi melalui, Tanya jawab langsung dengan peserta, Pengamatan implementasi di lapangan dan Laporan kegiatan dan progres desa

IV. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

4.1 Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi

Pelaksanaan aksi perubahan Transformasi Menuju Desa Digital telah memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kinerja organisasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, membangun sistem kerja yang lebih responsif, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Perubahan ini tampak melalui berbagai capaian, baik secara struktural maupun fungsional, yang tercermin dalam peningkatan efektivitas layanan, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan tumbuhnya budaya kerja digital di lingkungan pemerintah desa. Salah satu capaian penting adalah hadirnya layanan berbasis website di desa yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan mengakses layanan administrasi secara lebih cepat dan transparan. Hal ini menjadi indikator meningkatnya efektivitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.

Berikut secara lengkap capaian hasil pelaksanaan aksi perubahan Transformasi Menuju Desa Digital Dengan Lokus Desa Waeputeh sebagai desa sasaran:

Milestone 1: Terbentuknya Tim Kerja Aksi Perubahan

1) Konsultasi dengan Mentor, Senin 12 Mei 2025

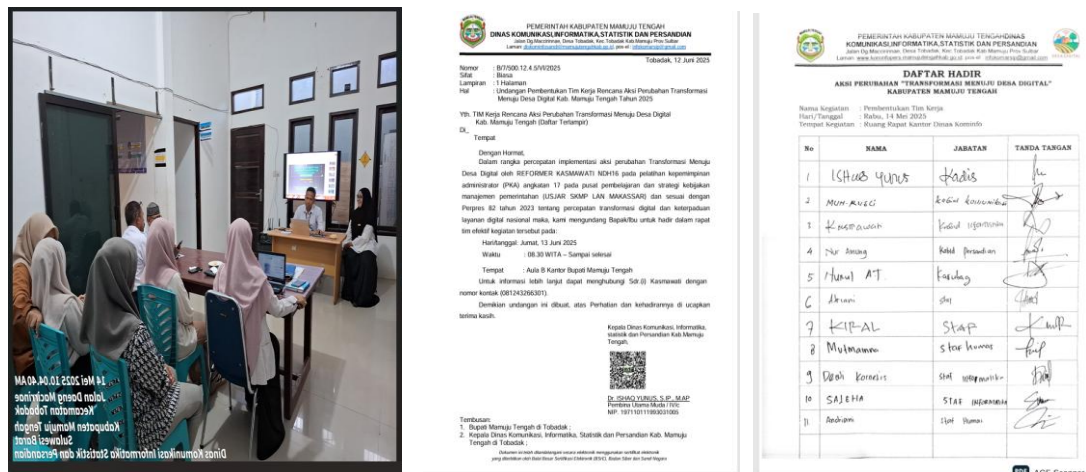
Konsultasi ini dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan strategis dari mentor terkait rencana aksi perubahan yang akan dijalankan. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pentingnya membentuk tim kerja yang kolaboratif, dengan struktur yang jelas dan berbasis pada kebutuhan program. Mentor juga memberikan panduan dalam menentukan kriteria anggota tim serta peran dan tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan aksi perubahan dapat berjalan optimal.



Gambar 3. Koordinasi dan Konsultasi dengan Kepala Dinas Kominfosandi selaku Mentor

2) Rapat Pembentukan Tim Kerja, Rabu 14 Mei 2025

Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil konsultasi dengan mentor. Dalam rapat yang diadakan pada Rabu, 14 Mei 2025, dilakukan pembahasan mengenai struktur tim kerja, pembagian tugas, dan penetapan anggota tim yang terdiri dari unsur perangkat desa, operator sistem informasi, serta pendamping teknis. Proses pembentukan tim dilakukan secara partisipatif untuk memastikan komitmen dan keselarasan tujuan antar anggota. Hasil rapat ini menetapkan terbentuknya Tim Kerja Aksi Perubahan yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program “Transformasi Menuju Desa Digital” di Desa Waeputeh.

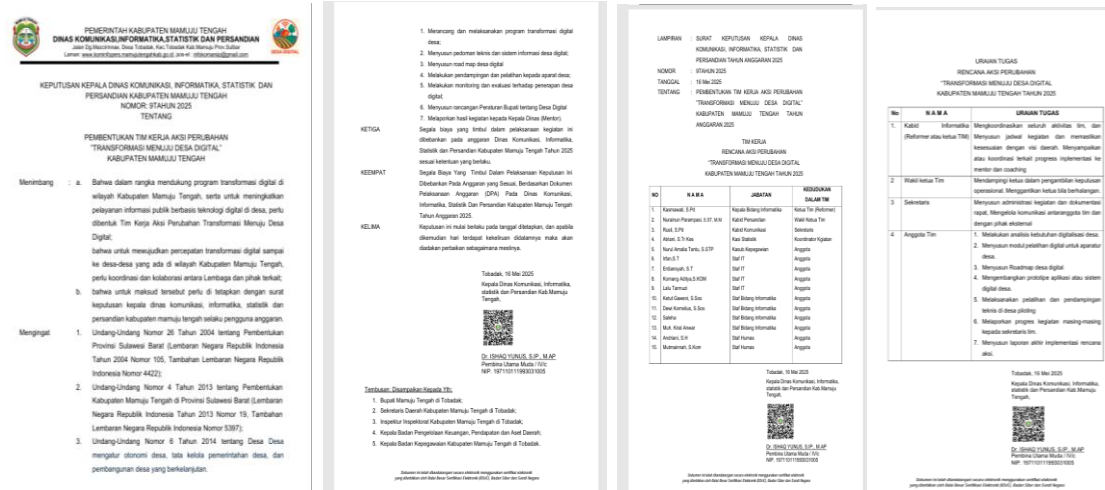


Gambar 4. Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Kerja/Efektif

3) Penerbitan Surat Keputusan Tim Kerja, Kamis 15 Mei 2025

Sebagai bentuk legalitas dan penguatan kelembagaan, pada Kamis, 16 Mei 2024 diterbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kominfosandi tentang pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan “Transformasi Menuju Desa Digital.” SK ini memuat nama-nama anggota tim, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta ruang lingkup kerja tim. Dengan adanya SK tersebut, tim kerja memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan tugasnya secara formal, efektif, dan akuntabel. Surat Keputusan tersebut berisi pedoman mengenai kedudukan, tugas dan fungsi anggota tim kerja Aksi Perubahan

Transformasi Desa Digital.



Gambar 5. Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja/Efektif

d. Melakukan koordinasi dengan stakeholder Stakholder Internal

Koordinasi dengan stakeholder internal dilakukan untuk memastikan seluruh pihak di lingkungan internal pemerintahan desa memiliki pemahaman yang sama dan mendukung pelaksanaan aksi perubahan. Stakeholder internal meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa lainnya, serta operator sistem informasi desa. Dalam proses koordinasi ini, dijelaskan maksud dan tujuan program “Transformasi Menuju Desa Digital,” pembagian peran, serta pentingnya kolaborasi antar perangkat desa. Hasil koordinasi menunjukkan adanya komitmen bersama untuk menyukseskan inovasi digital sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa Waeputeh.



Gambar 6. Kordinasi Ke Kecamatan Dan Desa



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUS TAPA**
 Jabatan : **Ko. Desa**
 Instansi : **WAEPUTEH**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XVII pada Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (PUSJAR SKMP) LAN Makassar, dengan ini memberikan dukungan

Kepada :

Nama : **KASIMAWATI, S.Pd**
 NIP : **19761203 200312 2 007**
 Pangkat / Gol : **Pembina IV/a**
 Jabatan : **Kepala Bidang Informatika**
 Instansi : **Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah**

Judul Aksi Perubahan : **"Transformasi Menuju Desa Digital" (Desa Waeputeh)**

Catatan Dukungan:

Mendukung penuh untuk di implementasikan di desa Waeputeh, dengan memberikan alokasi anggaran dan menetapkan SK kades terkait program kerja desa Waeputeh menuju Desa Digital

Tobadak, 26 Mei 2025

(Signature)
MUS TAPA

Gambar 7. Dukungan Kepala Desa



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PAUYANFO**
 Jabatan : **Ketua BPD**
 Instansi : **DESA WAEPUTEH**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XVII pada Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (PUSJAR SKMP) LAN Makassar, dengan ini memberikan dukungan

Kepada :

Nama : **KASIMAWATI, S.Pd**
 NIP : **19761203 200312 2 007**
 Pangkat / Gol : **Pembina IV/a**
 Jabatan : **Kepala Bidang Informatika**
 Instansi : **Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah**

Judul Aksi Perubahan : **"Transformasi Menuju Desa Digital" (Desa Waeputeh)**

Catatan Dukungan:

Sip bersinergi dan berkolaborasi terkait data, sosialisasi kemasyarakatan dan menyepakati anggaran perubahan desa digital (program kegiatan)

Tobadak, 11 Juni 2025

(Signature)
PAUYANFO

Gambar 8. Dukungan Badan Pemberdayaan Desa (PMD)

Koordinasi ke Stakholdere eksternal Mitra Pendukung, sekaligus meminta dukungan dalam rangka melancarkan program Transformasi menuju Desa digital.

Koordinasi dengan stakeholder eksternal dilakukan sebagai upaya membangun sinergi dan meminta dukungan dalam rangka kelancaran pelaksanaan program “Transformasi Menuju Desa Digital.” Mitra pendukung yang dilibatkan meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, lembaga pendamping desa, serta pihak swasta yang relevan. Dalam koordinasi ini, disampaikan rencana aksi, kebutuhan dukungan teknis maupun non-teknis, serta peluang kolaborasi dalam hal pelatihan, infrastruktur digital, dan penyediaan perangkat. Hasilnya, para mitra eksternal menyatakan dukungan penuh dan kesediaan untuk berperan aktif dalam mendorong suksesnya transformasi digital di Desa Waeputeh.



Gambar 9. Dukungan Bupati Mamuju Tengah



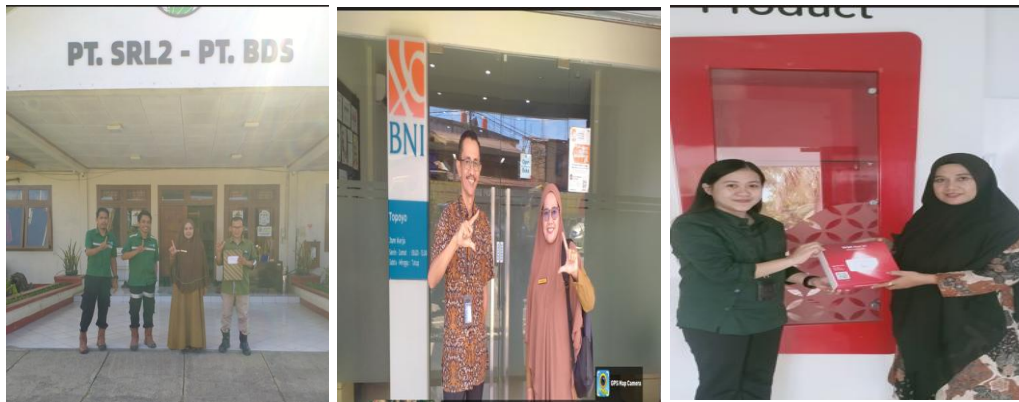
Gambar 10. Dukungan Sekretaris Daerah Kab. Mamuju Tengah



Gambar 11. Dukungan Kepala BPKAD Kab. Mamuju Tengah



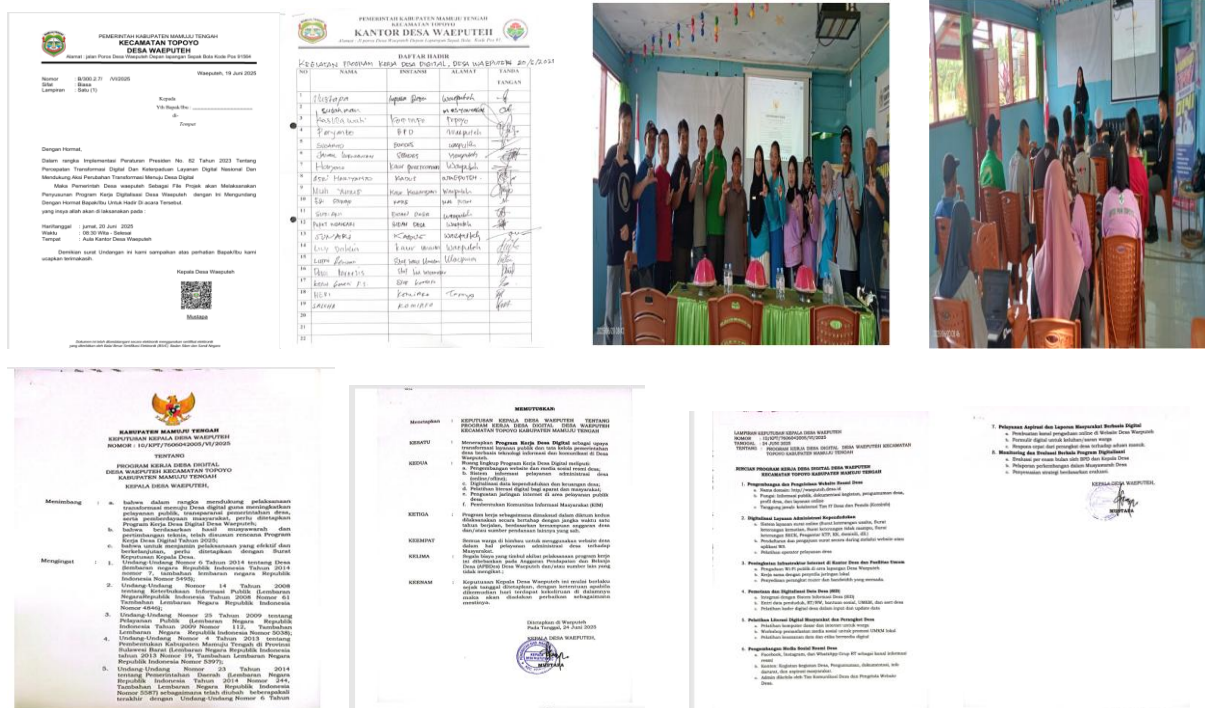
Gambar 12. Dukungan PT. Telkom Cabang Mamuju



Gambar 13. Dukungan Mitra aksi perubahan

Milestone 2 : Tersusunnya Roadmap Program Kerja Desa Digital

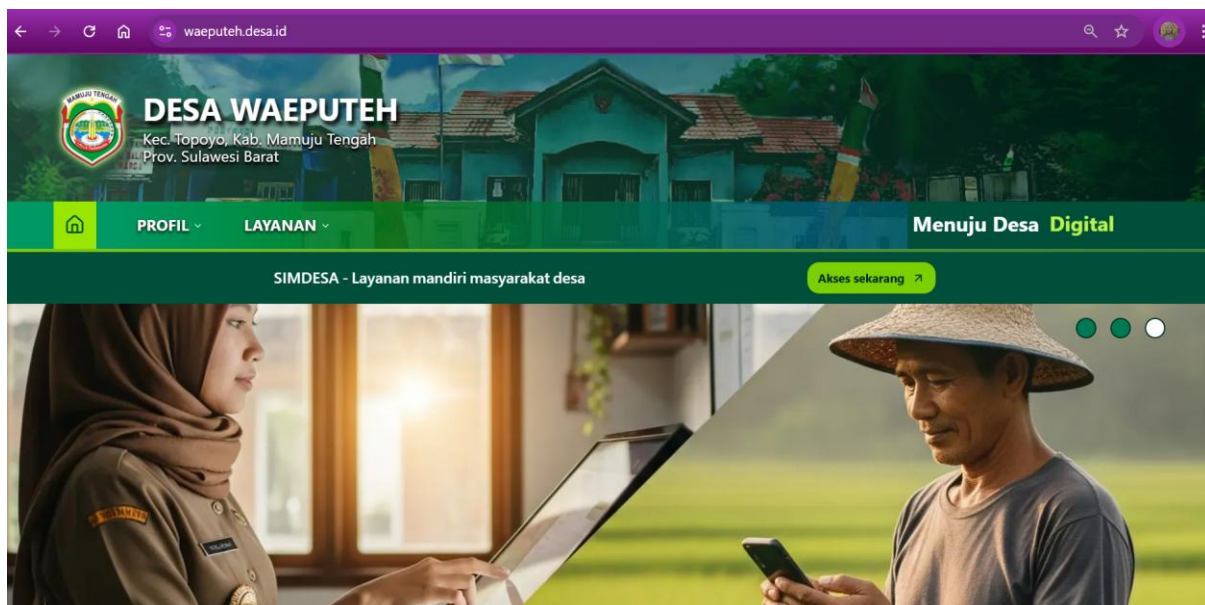
Roadmap Program Kerja Desa Digital disusun sebagai panduan strategis untuk mengarahkan pelaksanaan program secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen roadmap ini memuat visi, tujuan, tahapan kegiatan, indikator keberhasilan, serta target waktu pelaksanaan dari setiap fase transformasi digital. Penyusunan roadmap dilakukan secara kolaboratif antara tim kerja, perangkat desa, dan pihak terkait, dengan mempertimbangkan kondisi riil desa, potensi lokal, serta kebutuhan masyarakat. Dengan adanya roadmap ini, implementasi program “Transformasi Menuju Desa Digital” di Desa Waeputeh menjadi lebih terarah, sistematis, dan mudah dievaluasi.



Gambar 14. Proses Penyusunan Roadmap Program Kerja Desa Digital Waeputeh

Milestone 3 : Tersedianya Infrastruktur dasar

Ketersediaan infrastruktur dasar menjadi fondasi utama dalam mendukung implementasi program “Transformasi Menuju Desa Digital.” Infrastruktur yang dimaksud meliputi jaringan internet yang stabil, perangkat komputer/laptop, printer, serta perangkat pendukung lainnya yang digunakan dalam pelayanan digital di kantor desa. Selain itu, disiapkan juga sistem informasi berbasis web untuk mendukung transparansi dan kemudahan akses layanan publik. Pemenuhan infrastruktur ini dilakukan secara bertahap melalui dukungan dari pemerintah desa, mitra eksternal, dan swadaya masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, pelayanan digital dapat berjalan dengan lancar dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.



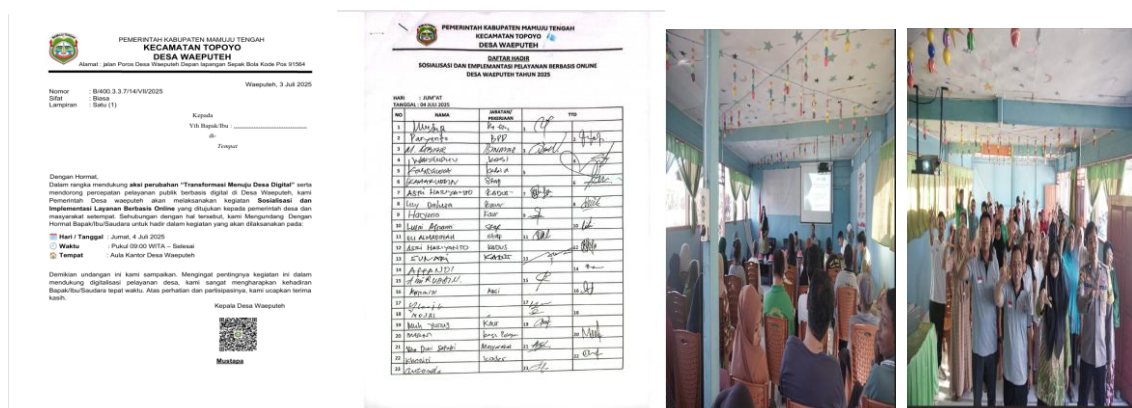
Gambar 15.:Proses Pembangunan wifi area publik di lapangan Desa Waeputeh, perangkat seperti laptop dan website desa

Milestone 4 : Tersedianya Pelatihan Literasi Digital Dasar Untuk Perangkat Desa dan Masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung transformasi digital, diselenggarakan pelatihan literasi digital dasar bagi perangkat desa dan masyarakat. Pelatihan ini mencakup pengenalan komputer, penggunaan internet secara bijak, pengelolaan data dan dokumen digital, serta pemanfaatan aplikasi layanan desa. Kegiatan pelatihan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat pemahaman peserta. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan seluruh elemen desa memiliki kemampuan dasar yang cukup untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan publik.



Gambar 16. Proses Pelatihan Staf Desa Waeputeh pengelolaan layanan website desa

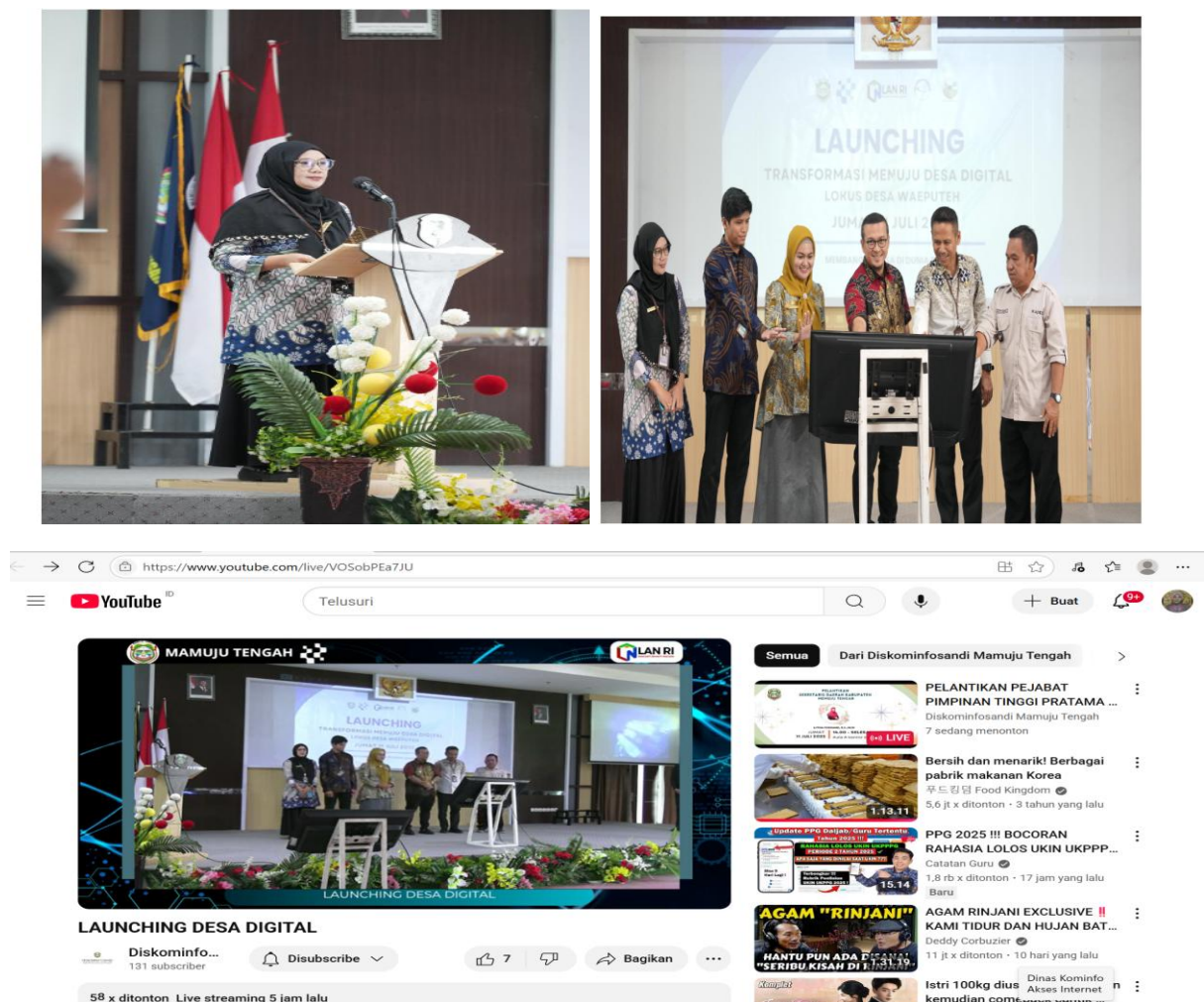


Gambar 17. Proses sosialisasi dan implemnetasi layanan Berbasis On Line bagi masyarakat Desa Waeputeh

Milestone 5: Terlaksananya Launching Layanan Publik digital Desa

Launching layanan publik digital desa merupakan momen penting yang menandai dimulainya secara resmi pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan administrasi dan informasi di Desa Waeputeh. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pernyataan kesiapan desa dalam memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi. Acara launching dihadiri oleh pemerintah daerah, stakeholder terkait, mitra pendukung, serta masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Dalam kegiatan ini juga diperkenalkan fitur-fitur layanan digital seperti pengurusan surat online, informasi desa berbasis web, dan pelaporan masyarakat secara daring. Launching ini menjadi titik awal perubahan menuju tata kelola pemerintahan desa yang modern dan responsif.

[\(8180\) LAUNCHING DESA DIGITAL - YouTube](https://www.youtube.com/live/VO5obPEa7JU)



Gambar 18. LounchingTransformasi menuju Desa Waeputeh

Milestone 6: Tersedianya Sk Bupati Mamuju Tengah tentang penetapan desa Waeputeh sebagai Desa digital kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025.

Sebagai bentuk legitimasi dan dukungan pemerintah daerah terhadap program transformasi digital di tingkat desa, Bupati Mamuju Tengah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penetapan Desa Waeputeh sebagai Desa Digital pada tahun 2025. SK ini menjadi dasar hukum dan acuan resmi dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan digitalisasi layanan publik di desa. Dengan adanya SK tersebut, status Desa Waeputeh sebagai pionir desa digital di Kabupaten Mamuju Tengah menjadi lebih kuat, serta membuka peluang untuk memperoleh dukungan lintas sektor baik dari pemerintah daerah, mitra kerja, maupun lembaga terkait lainnya.



Gambar 19. Surat Rekomendasi penetapan Desa Waeputeh sebagai desa digital dan SK Bupati Mamuju tengah

4.2. Manfaat Aksi Perubahan

1. Bagi Masyarakat Desa Waeputeh

- Kemudahan akses layanan publik di Desa, Masyarakat desa dapat mengurus surat menyurat dan layanan administrasi secara online tanpa harus datang ke kantor desa.
- Informasi lebih terbuka, Warga Desa mudah mengakses informasi tentang program bantuan, kegiatan desa, dan kebijakan pemerintah melalui media digital.

- c) Meningkatkan literasi digital, Warga Desa Waeputeh mulai mengenal dan menggunakan teknologi dalam kehidupan setelah diadakannya pelatihan terkait layanan on line desa.
- d) Partisipasi lebih aktif, Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pengaduan, atau saran melalui platform digital desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

- a) Kinerja lebih efisien dengan adanya Sistem kerja menjadi lebih cepat, tertata, dan terdokumentasi dengan baik melalui digitalisasi administrasi (layanan Website Desa).
- b) Kemudahan dalam pengelolaan data, baik Data kependudukan, potensi, dan kegiatan desa tersimpan secara sistematis dan bisa diakses kapan saja.
- c) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Semua program dan penggunaan dana desa dapat dipublikasikan secara online, sehingga lebih mudah diawasi.
- d) Meningkatkan citra dan daya saing desa, Pemerintah desa menjadi lebih profesional dan dipercaya masyarakat.

3. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda)

- a) Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, Pemerintah Daerah terbantu dalam percepatan transformasi digital di wilayah kerjanya.
- b) Data desa lebih terintegrasi dan valid, Mempermudah perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data real-time dari desa.
- c) Memperkuat capaian kinerja daerah, Program desa digital mendukung target RPJMD, reformasi birokrasi, dan indikator kinerja Pemda.

4. Bagi Reformer (Agen Perubahan)

- a) Menjadi motor penggerak inovasi pelayanan publik, Reformer berperan langsung dalam mendorong perubahan pola kerja birokrasi yang lebih adaptif dan berbasis teknologi.
- b) Reformer mendapatkan pengalaman lapangan dalam manajemen perubahan, kolaborasi, dan penerapan teknologi informasi di sektor publik.

- c) Capaian aksi perubahan yang berdampak nyata, Keberhasilan implementasi desa digital menjadi bagian dari rekam jejak profesional reformer.
- d) Meningkatkan jejaring dan kolaborasi lintas sektor, Dalam proses implementasi, Penguatan kapasitas kepemimpinan, reformer terlibat aktif dengan berbagai pihak (desa, OPD, mitra digital).

4.2 Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Dalam Pengembangan kompetensi pada aksi perubahan bukan hanya kegiatan formal, tapi dijalankan melalui pendekatan praktik langsung, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Dimana pengembangan kompetensi menjadi elemen strategis untuk memastikan keberhasilan program aksi perubahan Transformasi Manuju Desa Digital dan keberlanjutannya. Berikut uraian implementasi pengembangan kompetensi yang dilakukan :

1. Reformer (Agen Perubahan)

Sebagai Perancang, penggerak, dan pengawal transformasi digital pada aksi perubahan, reformer membutuhkan pengembangan kompetensi. Implementasi Pengembangan Kompetensi yang dilakukan yaitu:

- 1) Konsultasi rutin dengan mentor dan coach dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang strategi manajemen perubahan dan penajaman arah aksi. Reformer berdiskusi dengan mentor terkait roadmap desa digital dan solusi atas kendala lapangan.
- 2) Reformer menambah pengetahuan tentang desa digital dengan mencari referensi di media sosial, maupun sharing dengan pihak-pihak terkait tentang desa digital yang telah lebih dahulu menerapkan layanan digital.
- 3) Terlibat langsung dalam pelatihan teknis Reformer tidak hanya memimpin, tetapi ikut serta dalam pelatihan penggunaan aplikasi desa digital bersama tim kerja dan perangkat desa waeputeh.

2. Tim Kerja Aksi Perubahan

Peran utama tim aksi perubahan yaitu mendampingi Pelaksana teknis lapangan, sehingga pengembangan kompetensi yang di butuhkan adalah:

- 1) Pelatihan teknis pengelolaan website desa dan sistem informasi layanan, tim kerja dilatih langsung oleh mitra teknis (Dinas Kominfo/Pihak ketiga) tentang cara input data, mengelola konten layanan publik, dan fitur pengaduan masyarakat.
Contoh: Simulasi pembuatan surat keterangan domisili berbasis aplikasi desa.
- 2) Simulasi layanan digital bersama perangkat desa
Tim kerja mengadakan simulasi proses pelayanan digital dari awal hingga akhir untuk memastikan seluruh alur berjalan baik.
- 3) Pendampingan intensif selama masa uji coba sistem
Tim kerja mendampingi perangkat desa secara harian selama implementasi awal agar proses adaptasi berjalan lancar.

3. Stakeholder (Pemda, OPD, Mitra Teknis)

Salah satu peran dari stakholder adalah mendukung regulasi terkait penetapan desa digital, mendukung secara teknis, dan fasilitasi sumber daya, sehingga dibutuhkan Pengembangan Kompetensi yaitu:

- 1) Melakukan Workshop bersama Dinas Kominfo dan PMD
Stakeholder dilibatkan dalam penyamaan persepsi, pembagian peran, serta pemahaman teknis tentang manfaat dan cara kerja desa digital.
- 2) Penyusunan regulasi pendukung Pemda bersama stakeholder
dalam menyusun surat keputusan (SK) Bupati tentang Penetapan Desa Waeputeh sebagai pilot project desa digital Kabupaten Mamuju Tengah.
- 3) Fasilitasi pelatihan dan dukungan teknis OPD teknis dan mitra
menyediakan narasumber dan perangkat pendukung pelatihan, termasuk sistem, internet, dan alat bantu lainnya.

- 4) Pemberian komitmen dukungan berkelanjutan Stakeholder berkomitmen untuk mendampingi desa tidak hanya saat uji coba layanan website , tetapi juga saat replikasi ke desa lain.

V. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Keberlanjutan menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa aksi perubahan *Transformasi Menuju Desa Digital* tidak berhenti pada tahap implementasi awal, tetapi kedepan dapat terus berkembang dan direplikasi oleh desa-desa lain. Upaya keberlanjutan ini dirancang dengan pendekatan bertahap, berbasis kebutuhan, dan melibatkan banyak pihak secara aktif.

Untuk memastikan keberlanjutan aksi perubahan ini, maka perlu didukung oleh komitmen kelembagaan, partisipasi lintas pemangku kepentingan, serta integrasi ke dalam program kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian kabupaten mamuju Tengah.

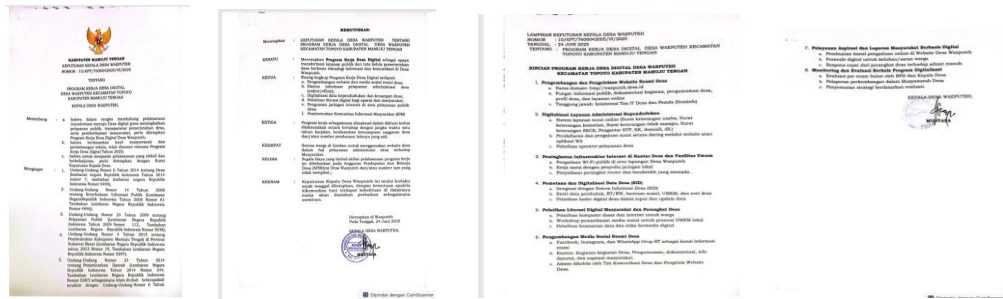
A. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

- Penetapan Desa Digital melalui SK Bupati Mamuju Tengah, Sebagai bentuk legalitas dan dasar hukum, Pemerintah Daerah menyusun Surat Keputusan Bupati tentang penetapan desa Waeputeh sebagai desa digital di Kabupaten Mamuju Tengah.



Gambar 20. Surat Keputusan Bupati mamuju Tengah Tentang Penetapan Desa Waeputeh Sebagai Desa digital

- Penetapan melalui surat keputusan kepala desa terkait program kerja desa digital desa waeputeh, dan akan diselaraskan kedalam RPJMDes dan RKPDes, serta diintegrasikan dalam perencanaan strategis Dinas Kominfo, PMD, dan Bappeda.



Gambar 21. Surat Keputusan Kepala Desa tentang program kerja desa digital desa waeputeh

B. Rencana tindak lanjut Aksi Perubahan

a. Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan

- a) Pelatihan lanjutan bagi perangkat desa dan masyarakat. Akan disusun agenda pelatihan tahunan/lokakarya secara periodik, baik secara mandiri oleh desa maupun dengan fasilitasi pemerintah daerah atau mitra.
- b) Replikasi dan Perluasan Program Pengembangan ke desa-desa lain di kabupaten Desa Waeputeh sebagai percontohan akan menjadi model replikasi bagi desa lain. Reformer bersama stakeholder akan mengawal proses adopsi ke minimal 3 desa dalam tahun berjalan.
- c) Penyusunan roadmap desa digital kabupaten dokumen roadmap ini memuat tahapan, target, dan strategi pengembangan desa digital hingga tahun tertentu, sebagai acuan bersama lintas sektor.

b. Pemanfaatan Anggaran dan Dukungan Mitra

- a) Pemanfaatan Dana Desa dan APBD, desa didorong mengalokasikan sebagian dana desa untuk operasional sistem digital (internet, pelatihan, pemeliharaan perangkat). OPD juga menyisipkan dukungan di DPA mereka.
- b) **Kemitraan dengan pihak swasta dan akademisi**, peluang kerja sama dengan penyedia layanan digital, dan universitas dibuka untuk mendukung aspek teknis, pelatihan, maupun evaluasi.

c. Monitoring dan Evaluasi Berkala

- a) **Penilaian berkala kinerja desa digital**, disusun indikator keberhasilan yang diukur secara periodik (semester/tahunan)

seperti jumlah layanan digital aktif, partisipasi masyarakat, dan dampak terhadap pelayanan.

- b) **Forum evaluasi lintas pihak**, dilaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi rutin antara desa, OPD, dan reformer untuk mengidentifikasi tantangan serta menyusun solusi perbaikan.

VI. KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN AKSI PERUBAHAN

Aksi perubahan *“Transformasi Menuju Desa Digital”* memiliki keterkaitan yang erat dan langsung dengan beberapa mata pelatihan pilihan yang diikuti selama Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Melalui mata pelatihan pilihan, peserta dibekali dengan kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan inovasi yang mampu menjawab tantangan pelayanan publik di era digital. Hal ini selaras dengan tujuan aksi perubahan yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan demikian, aksi perubahan ini tidak hanya menjadi implementasi nyata dari materi pelatihan, tetapi juga menjadi bentuk penguatan kapasitas kepemimpinan dalam menciptakan inovasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Tabel 12: Tabel keterkaitan dengan mata pelatihan pilihan

No	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan Dengan Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
1.	Transformasi Menuju Desa Digital	Kepemimpinan Transformatif	Memahami dasar-dasar kepemimpinan transformatif	Dalam Konteks peningkatan Kapasitas kepemimpinan sehingga reformer mampu berpikir strategis dan visioner, mendorong inovasi dan perubahan sistemik, mampu menggerakkan dan menginspirasi tim kerja. Berorientasi pada hasil dan dampak bagi masyarakat.	Modul PKA LAN 2001 Kepemimpinan Transformatif
2.		Organisasi Digital	Memahami penerapan teknologi dalam layanan dan komunikasi organisasi	Pemanfaatan layanan website desa untuk mengambarkan adanya adanya integrasi data teknologi dalam memberikan layanan informasi ke masyarakat Luas	Modul PKA LAN 2021 Organisasi Digital
2.		Standar Kinerja Pelayanan	Memahami penyusunan standar pelayanan publik,	Transformasi menuju desa digital, nantinya menjadi standar kinerja pelayanan dalam memberikan informasi yang akurat terkait informasi penganggaran dana desa	Modul PKA LAN 2021 Standar Kinerja Pelayanan

VII. DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

Diseminasi dan publikasi merupakan langkah strategis dalam menyampaikan informasi aksi perubahan *Transformasi Menuju Desa Digital* kepada seluruh elemen yang berkepentingan, baik internal desa maupun pihak eksternal seperti pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat umum. Tujuan utamanya adalah agar program ini tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami, diterima, dan didukung secara luas.

Melalui kegiatan diseminasi, informasi mengenai manfaat, proses, dan hasil dari aksi perubahan transformasi menuju desa digital disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. diseminasi Aksi Perubahan Transformasi menuju Desa Digital dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu dengan sosialisasi tatap muka atau melalui publikasi media online baik ke aparat dan warga desa waeputeh maupun kepada stakeholder eksternal .



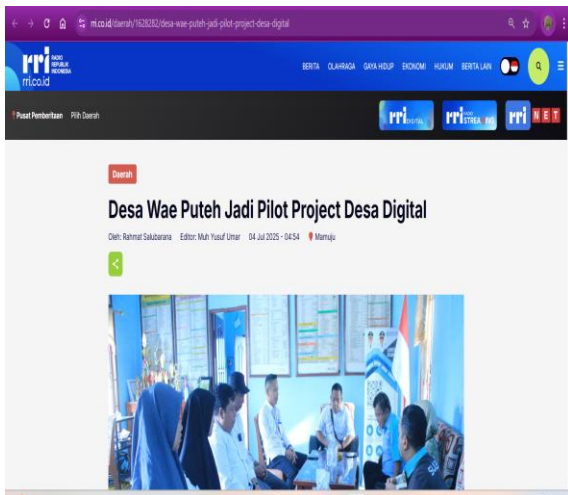
Gambar 22: diseminasi ke aparat dan warga desa



Gambar 23: diseminasi ke stakeholder

PUBLIKASI MELALUI MEDIA ONLINE DAN VIDEO TROON

1. <https://rri.co.id/mamuju/info-pemda/1644680/launching-desa-digital-menuju-transformasi-digital-di-mamujutengah>
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1628282/desa-wae-puteh-jadi-pilot-project-desa-digital>
3. <https://www.sulbarkini.com/desa-wae-puteh-di-kabupaten-mamuju-tengah-jadi-proyek-percontohan-desa-digital-di-sulbar/>
4. <https://mamujutengahkab.go.id/berita/detail/sosialisasi-layanan-website-desa-waeputeh-wujud-transformasi-menuju-desa-digital>
5. <https://diskominfosandi.mamujutengahkab.go.id/berita/bimtek-pengelolaan-website-desa-wujudkan-transformasi-menuju-desa-digital-di-desa-waeputeh-kabupaten-mamuju-tengah-tahun-2025>
- 6.





SOSIALISASI LAYANAN WEBSITE DESA WAEPUTEH: WUJUD TRANSFORMASI MENUJU...

www.benubase.my.id

<http://www.benubase.my.id/2025/07/sosialisasi-layanan-website-desa.html>

22.41



SIRAJUDDIN, Wartawan Mateng

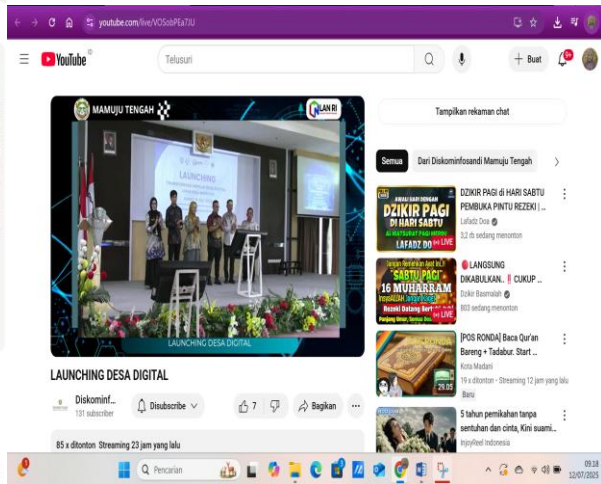


Bupati Mamuju Tengah Membuka Launching Transformasi Menuju Desa...
Bupati Mamuju Tengah Membuka Launching
youtube.com

<https://youtu.be/jGftKSfO4yM?si=d8cysdS3KG6ZGP84>

Berita ada di deskripsi video 👍👍👍

15.44



SIRAJUDDIN, Wartawan Mateng



Kasmawati : Titik Awal Pemerintahan modern, transparan dan partisipatif melalui teknologi...
Mamuju Tengah – latar belakang terwujudnya kegiatan ini adalah transformasi digital yang tertuang dalam Peraturan
mamujutengah.indonesiasatu.co.id

Kasmawati : Titik Awal Pemerintahan modern, transparan dan partisipatif melalui teknologi digital -
<https://mamujutengah.indonesiasatu.co.id/kasmawati-titik-awal-pemerintahan-modern-transparan-dan-partisipatif-melalui-teknologi-digital>

09.48



Dinas Kominfopers Berkomitmen Untuk Memperkuat Dan Mendukung Visi-Misi Bupati...
Mamuju Tengah – Transformasi digital tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada
mamujutengah.indonesiasatu.co.id

Dinas Kominfopers Berkomitmen Untuk Memperkuat Dan Mendukung Visi-Misi Bupati Mamuju Tengah -
<https://mamujutengah.indonesiasatu.co.id/dinas-kominfopers-berkomitmen-untuk-memperkuat-dan-mendukung-visi-misi-bupati-mamuju-tengah>

09.41

<https://web.whatsapp.com/>



VIII. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pelaksanaan pengembangan potensi diri merupakan bagian penting dalam mendukung peran reformer sebagai penggerak utama aksi perubahan. Dalam program *Transformasi Menuju Desa Digital*, reformer secara aktif melakukan upaya penguatan kapasitas diri untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan kualitas implementasi program. Proses ini dilakukan secara terencana, sistematis, dan konsisten dengan mengedepankan nilai integritas, tanggung jawab, dan disiplin.

1. Melakukan Konsultasi dan Pembinaan Bersama Coach dan Mentor

Reformer secara aktif melakukan konsultasi intensif untuk merancang, mengarahkan, dan menyempurnakan aksi perubahan. Melalui proses ini, reformer membangun kemampuan berpikir strategis, kepemimpinan adaptif, dan pemecahan masalah berbasis data.

Bukti Dukung:

Konsultasi dengan mentor beserta dokumen bukti dukungan kepala dinas sebagai mentor.



Gambar 24: kordinasi bersama coach dan mentor

2. Meningkatkan Kompetensi Teknis Digital

Pada aksi perubahan Reformer menginisiasi terbangunnya layanan website desa, namun demikian untuk peningkatan pengembangan diri, reformer ikut dalam mempelajari layanan website desa dan berbagai referensi dan praktik baik digitalisasi desa.

Bukti Dukung:

Dokumentasi pemanfaatan sistem digital (admin web desa, aplikasi pelayanan)

<https://waeputeh.desa.id/>



Gambar 25: Pelatihan pengelolaan website desa

3. Peningkatan Keterampilan Manajerial dan Koordinasi

Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi program “Transformasi Menuju Desa Digital,” dilakukan upaya peningkatan keterampilan manajerial dan koordinasi bagi perangkat desa dan tim kerja. Penguatan ini mencakup kemampuan dalam perencanaan program, pengorganisasian tugas, pengambilan keputusan, serta pengelolaan waktu dan sumber daya secara efektif. Selain itu, ditingkatkan pula kapasitas koordinatif, baik secara internal antar perangkat desa, maupun eksternal dengan stakeholder dan mitra pendukung. Melalui peningkatan keterampilan ini, diharapkan proses pelaksanaan program berjalan lebih terstruktur, responsif, dan berorientasi pada hasil.



Gambar 26: rapat terkait pembahasan program kerja desas



Gambar 27: Dokumentasi rapat koordinasi lintas sektor (Kecamatan, Diskominfo, Desa, provider)

IX. PENUTUP

A. Kesimpulan

Aksi perubahan “Transformasi Menuju Desa Digital” merupakan inisiatif strategis dalam menjawab tantangan kesenjangan akses informasi dan layanan publik di wilayah pedesaan Kabupaten Mamuju Tengah. Melalui digitalisasi administrasi desa dan peningkatan literasi digital, inovasi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transformasi ini dimulai melalui pilot project di Desa Waeputeh, dengan pengembangan infrastruktur TIK, pelatihan perangkat desa, dan pembangunan website desa sebagai pusat layanan dan informasi digital. Proyek ini disusun secara terstruktur melalui milestone jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan kolaborasi lintas sektor baik dari pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat desa sendiri.

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan regulasi yang belum memadai, strategi yang disusun dalam laporan ini berdasarkan analisis SWOT dan manajemen risiko telah memperlihatkan pendekatan komprehensif dan realistis untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, aksi perubahan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik desa, partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, serta mempercepat pencapaian visi Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah agropolitan yang maju dan berkelanjutan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Untuk memastikan bahwa inovasi Transformasi Menuju Desa digital yang telah diinisiasi tidak hanya berhenti pada tahap implementasi awal, tetapi terus dikembangkan, dimanfaatkan, dan direplikasi. RTL ini juga menjadi panduan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program secara berkelanjutan dan terarah. Langkah-Langkah Tindak Lanjut yang dilakukan adalah:

1. Evaluasi Berkala Pemanfaatan Layanan Digital

Evaluasi dilakukan secara triwulanan untuk mengetahui sejauh mana sistem layanan digital desa dimanfaatkan oleh masyarakat. Evaluasi ini mencakup analisis data akses sistem, feedback pengguna, dan kendala teknis yang dihadapi. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan pengembangan layanan selanjutnya.

2. **Pelatihan Literasi Digital Lanjutan**

Setelah pelatihan awal dilaksanakan, maka akan dilakukan pelatihan lanjutan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Materi mencakup penggunaan sistem layanan digital, keamanan digital, hingga pengelolaan data desa.

3. **Penguatan Regulasi dan Kelembagaan**

Agar program Desa Digital memiliki dasar hukum yang kuat, akan disusun dan ditetapkan Peraturan Desa (Perdes) atau Surat Keputusan Kepala Desa tentang penyelenggaraan layanan digital. Selain itu, akan dibentuk unit pengelola layanan digital desa untuk memastikan pengelolaan sistem yang berkelanjutan serta mendorong pemanfaatan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) untuk penyebarluasan informasi ditingkat desa.

4. **Pengembangan dan Integrasi Sistem**

Sistem layanan digital desa akan dikembangkan lebih lanjut, termasuk integrasi dengan sistem layanan kabupaten seperti Dukcapil, PTSP, BPJS, Diskominfo, dan insytansi lainnya yang memiliki keterkaitan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan memperluas manfaat layanan digital.

5. Penyusunan Roadmap Desa Digital.

Untuk mengarahkan pengembangan jangka menengah dan panjang, maka akan disusun Roadmap Desa Digital 1 sd 5 Tahun ke Depan. Dimana roadmap ini mencakup tahapan pengembangan teknologi, literasi digital, SDM, dan integrasi sistem pelayanan publik berbasis digital.

6. Replikasi ke Desa Lain

Desa Waeputeh akan menjadi model percontohan (pilot project) yang

dapat direplikasi ke desa lain di wilayah Mamuju Tengah. Replikasi ini akan dimulai dari 1-2 desa terdekat yang memiliki kesiapan infrastruktur dan dukungan perangkat desa.